

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun oleh :**  
**Khoirina Nuryani**  
**10404241020**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014**

**Disusun Oleh:**

**KHOIRINA NURYANI**

**NIM. 10404241020**

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan  
TIM Pengaji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas  
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 September 2014

Pembimbing



Drs. Suwarno M.Pd

NIP.19510709 198003 1 002

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

### **EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014**

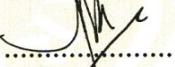
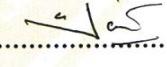
**Disusun Oleh:**

**KHOIRINA NURYANI**

**NIM. 10404241020**

Telah dipertahankan di depan TIM Pengaji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada 8 Oktober 2014 dan dinyatakan lulus.

#### **Tim Pengaji**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
Kiromim Baroroh, M.Pd	Ketua Pengaji		22 Oktober 2014
Drs. Suwarno, M.Pd	Sekretaris Pengaji		22 Oktober 2014
Dr. Endang Mulyani M.Si	Pengaji Utama		20 Oktober 2014

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

**Dekan**



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khoirina Nuryani  
NIM : 10404241020  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Judul Skripsi :

### **EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 30 September 2014

Penulis



Khoirina Nuryani

NIM. 10404241020

## **MOTTO**

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), Bahwasannya Aku adalah Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam Kebenaran”.

(QS. Al Baqarah 186)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”.

(Lessing)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”.

(Abu Bakar Sibli)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil' alamin*

*Dengan memanjatkan puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, yang Maha Sempurna dan yang memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Karya ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Muh Untara dan Ibu Dwi Yati) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan moril maupun materiil, dan dorongan sehingga Jugas Akhir Skripsi ini dapat selesai dengan baik.*

*Kubingkisan Jugas Akhir Skripsi ini untuk*

- Adikku Arif Nur Imam yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal.*
- Jito Rizal Faishal yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini.*
- Sahabat-sahabat ku Harsi, Lala, Ayu, Ela, Windy, Ria, Mifta, Erna yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungannya.*
- Teman-teman ku Ayunita, Adidu, Heni, Tia, Guntoro dan seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi 2010, terimakasih atas motivasi dan masukannya demi terselesaikannya Jugas Akhir Skripsi ini.*
- Serta Almamaterku tercinta.*

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014**

Oleh:  
Khoirina Nuryani  
NIM. 10404241020

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dilihat dari sisi pelaksanaan, kendala dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat pelaksanaan SPM.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan/ketimpangan (*The Discrepancy Evaluation Model*) berdasarkan pendekatan kuantitatif. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan karyawan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan indikator pencapaian yang telah memenuhi SPM sebesar 72,42% dan belum memenuhi SPM sebesar 27,58%. SPM belum terpenuhi dalam hal ketersediaan peraga IPA, penerapan RPP, pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan Rencana Tahunan Sekolah. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM ini yaitu kurangnya informasi yang diterima sekolah mengenai SPM, keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khususnya peraga IPA, kualitas SDM baik guru maupun kepala sekolah masih kurang dan kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah. (3) Solusi yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi mengenai SPM, sekolah harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana, mengoptimalkan peran kepala sekolah dan peran guru, sekolah harus menyusun, memonitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Sekolah yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan.

Kata Kunci: *Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Dasar*

**AN EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE STANDARD  
OF MINIMUM SERVICES FOR PRIMARY EDUCATION AT SD  
UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK, BANTUL REGENCY, IN  
THE ACADEMIC YEAR OF 2013/2014**

**By:  
KHOIRINA NURYANI  
NIM. 10404241020**

**ABSTRACT**

This study aims to investigate the implementation of the Standard of Minimum Services (SMS) for Primary Education at SD Unggulan Muhammadiyah Kretek in terms of the implementation, constraints, and solutions that can be made to deal with the constraints in the implementation of SMS.

This was an evaluation study employing the discrepancy evaluation model based on the quantitative approach. The data were analyzed by means of the descriptive technique. The research subjects were the principal and teachers of SD Unggulan Muhammadiyah Kretek, Bantul Regency. The data were collected through observations, documentation, and interviews.

The results of the study are as follows. (1) Regarding the implementation of SMS for Primary Education at SD Unggulan Muhammadiyah Kretek based on the attainment indicators, aspects fulfilling SMS are 72.42% and those not fulfilling SMS are 27.58%. SMS has not been fulfilled in relation to the availability of science media, the application of lesson plans, the implementation of the principal's supervision, and the Annual School Plan. (2) The constraints in the implementation of SMS include the lack of information that the school receives about SMS, the limited budget to procure infrastructure facilities, especially science media, the inadequate quality of human resources including the teachers and principal, and the lack of effectiveness in the implementation of school programs. (3) The solutions include the socialization of SMS, the procurement of infrastructure facilities based on the school's priority scale, the optimization of the principal and teacher roles, the necessity for the school to design, monitor, and evaluate the School Activity Plan consisting of the School Activity and Budget Plan and the Annual Work Plan.

**Keywords:** *Standard of Minimum Services, Primary Education*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah, nikmat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014” dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaiannya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan saran dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi.
3. Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan dan pengarahan di bidang akademik selama masa studi.

4. Drs. Suwarno, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi Ini.
5. Endang Mulyani, M.Si selaku narasumber yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran guna perbaikan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Kiromim Baroroh, M.Pd selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat untuk proses penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama masa studi.
8. Drs. Sardji M.G selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Kretek yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Sumarno selaku TU SD Unggulan Muhammadiyah Kretek yang telah membantu penulis dalam penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian.
10. Guru dan karyawan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek yang telah membantu penulis dalam penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan, bimbingan, araha, motivasi, saran serta bantuan selama proses penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 30 September 2014

Penulis



Khoirina Nuryani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>Hal</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II.KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>Hal</b>
A. Kajian Teori .....	10
1. Evaluasi .....	10
a. Pengertian Evaluasi .....	10
b. Pengertian Evaluasi Program .....	11
c. Model-model Evaluasi Program .....	12
2. Kebijakan Publik .....	15
a. Pengertian Kebijakan Publik .....	15
b. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	16
c. Proses Kebijakan Publik .....	18
d. Lingkungan Kebijakan .....	23
e. Jenis-jenis Kebijakan Publik .....	23
3. Implementasi Kebijakan .....	24
a. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	24
b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ...	25
4. Sistem Pelayanan Publik .....	32
a. Pengertian Pelayanan Publik .....	32
b. Standar Pelayanan .....	34
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .....	36
a. Pengertian SPM Pendidikan Dasar .....	36
b. Indikator Pencapaian SPM Pendidikan Dasar .....	37
B. Penelitian yang Relevan .....	38
C. Kerangka Berpikir .....	40

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Hal</b>
A. Desain Penelitian .....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	44
D. Subjek Penelitian .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
1. Observasi .....	46
2. Dokumentasi .....	47
3. Wawancara .....	47
F. Instrumen Penelitian .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Hal</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Deskripsi Lokasi .....	50
a. Sejarah Sekolah .....	50
b. Visi Misi Sekolah .....	50
c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	51
d. Peserta Didik .....	52
e. Sarana dan Prasarana .....	53
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	54
a. Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana .....	57
b. Jenis Pelayanan Pendidik dan Kependidikan .....	59
c. Jenis Pelayanan Kurikulum .....	60
d. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan .....	61
e. Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu .....	62
f. Jenis Pelayanan Manajemen Sekolah .....	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
1. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek .....	65
a. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar .....	65
b. Kendala Pencapaian SPM Pendidikan Dasar .....	68
c. Solusi Pencapaian SPM .....	70
2. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Jenis Pelayanan .....	72
a. Sarana dan Prasarana .....	72
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	75
c. Kurikulum .....	76
d. Penilaian Pendidikan .....	78
e. Penjaminan Mutu .....	80
f. Manajemen Sekolah .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>Hal</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Tahap Analisis Kegiatan .....	19
2. Instrumen Penelitian .....	48
3. Klasifikasi Kategori .....	49
4. Jumlah Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek .....	52
5. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar .....	56
6. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana ....	57
7. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum .....	60
8. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu .....	62
9. Jumlah Buku Teks .....	100
10. Jumlah Peraga IPA .....	100
11. Jumlah Buku Pengayaan .....	101
12. Daftar Jam Bekerja Guru Tetap Yayasan .....	101
13. Jumlah Minggu Proses Pembelajaran .....	102
14. Jumlah Jam Per Minggu Berdasarkan Kelas .....	102
15. Pelaksanaan KTSP .....	102
16. Penerapan RPP oleh Guru .....	103
17. Program Penilaian Guru .....	104
18. Supervisi Kepala Sekolah .....	105
19. Laporan Hasil Prestasi Peserta Didik .....	105
20. Laporan Hasil Belajar oleh Kepala Sekolah .....	106
21. Manajemen Berbasis Sekolah .....	106
22. Dartar Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek .....	107

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Proses Kebijakan Publik .....	18
2. Tahapan Kebijakan Publik .....	20
3. Skema Kerangka Berpikir .....	42
4. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Berdasarkan Jenis Pelayanan .....	65
5. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Berdasarkan Indikator Pencapaian .....	66
6. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek .....	67
7. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana .....	73
8. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana .....	74
9. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum .....	76
10. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum .....	77
11. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan .....	79
12. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu .....	81
13. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu .....	81
14. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu .....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 .....	94
2. Hasil Penelitian .....	100
3. Kalender Akademik .....	108
4. Foto Dokumentasi .....	109
5. Ijin Penelitian dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ....	111
6. Ijin Penelitian dari BAPPEDA Bantul .....	112

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pendidikan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.

Menyadari akan pentingnya pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di Indonesia, salah satunya melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdiri dari SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi

untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, pemerintah harus tanggap agar dapat mengembangkan kompetensi guru sebagai pendidik dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbarui dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 pada poin 9 yaitu meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi 100 persen untuk jenjang pendidikan dasar. Hal ini berarti untuk tahun 2014 ini seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia sudah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak terkecuali untuk SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Menurut edukasi.kompas.com berdasarkan data yang ada hingga September 2011, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek adalah salah satu sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 2008 dengan tanggal SK Ijin operasional 16 Juni 2011 dan tanggal SK Pendirian 2 Januari 2012. Karena baru berdiri 5 tahun, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek belum pernah meluluskan siswanya. Sekolah ini dapat dikatakan masih baru sehingga masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Bangunan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek menempati bangunan bekas SD Negeri Gading 1 yang sudah tidak digunakan beberapa tahun. Sarana dan prasarana masih kurang memadai. Beberapa ruang terlihat masih belum layak, seperti ruang

guru yang sangat sempit sehingga kurang nyaman digunakan, perpustakaan masih 1 ruang dengan lab komputer. Kekurangan lain juga terlihat dari data Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Hasil EDS beberapa masih memperoleh skor capaian, baik capaian sekolah, kabupaten maupun provinsi dibawah 7 bahkan masih ada yang di bawah 5:

EDS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Instrumen EDS dirancang untuk digunakan oleh sekolah dalam melakukan penilaian kinerja sekolah terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam upaya peningkatan kinerja sekolah. Dari hasil EDS ini, dapat diketahui nilai atau skor yang diperoleh sekolah dalam berbagai hal yang dikategorikan dalam beberapa standar yang masuk dalam Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini meliputi *input, proces, output* dan *outcome* pendidikan yang dijabarkan dalam 8 standar. Standar tersebut yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian pendidikan. Namun untuk EDS hanya memuat 6 standar yaitu, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Kependidikan dan Standar Pengelolaan. Begitu pula dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun dalam pelaksanaan SPM tidak menggunakan berbagai standar melainkan menggunakan berbagai

indikator yang terbagi dalam pelayanan pendidikan dasar kabupaten/kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. SPM ini dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hasil EDS SD Unggulan Muhammadiyah Kretek menunjukkan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masih kurang dalam hal prestasi yang diperoleh baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek masih baru berdiri dan belum pernah meluluskan siswanya. Dalam Standar Isi (SI) terlihat kurikulum yang digunakan masih belum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan sekolah. Hal ini terlihat dari nilai capaian sekolah yang memperoleh skor 5,00, capaian kabupaten 4,47 dan capaian provinsi 4,49. Dalam Standar Proses, proses belajar mengajar (PBM) belum dilakukan secara efisien dan efektif dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku terlihat dari skor capaian sekolah 5,44, capaian kabupaten 5,42 dan capaian provinsi 5,40. Dalam Standar Penilaian, secara keseluruhan sudah bagus, namun dalam indikator analisis dan pelaporan hasil penilaian masih memperoleh skor capaian 5,24, capaian kabupaten 5,89 dan capaian provinsi 5,93. Dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) belum dilakukan peningkatan kompetensi (PTK) untuk memenuhi kebutuhan sekolah terlihat dari capaian sekolah memperoleh skor 5,39, skor capaian kabupaten 5,82 dan capaian sekolah 5,96. Standar yang terakhir yaitu Standar Pengelolaan. Dalam Standar Pengelolaan, komite sekolah juga kurang berkontribusi efektif terhadap peningkatan mutu sekolah terlihat dari nilai

capaian sekolah hanya memperoleh skor 3,71, capaian kabupaten 3,46 dan capaian provinsi 3,41.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dari 201.557 sekolah baik SD, SMP maupun SMA di Indonesia, 40,31% nya di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Sarana dan prasarana SD Unggulan Muhammadiyah Kretek masih kurang dalam menunjang pembelajaran.
3. Proses belajar mengajar belum dilakukan secara efisien dan efektif.
4. Komite sekolah masih kurang berkontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah.
5. Belum terdapat penghargaan yang diraih sekolah baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang ingin diteliti lebih terfokus dan mendalam. Dengan adanya permasalahan mengenai jumlah sekolah di Indonesia yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebanyak 40,31%, maka diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Penelitian ini menfokuskan pada evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Sekolah Dasar yang dilakukan penelitian adalah SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Permasalahan pada penelitian ini di batasi pada evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini berdasarkan indikator SPM untuk satuan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek?
2. Apa kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.
2. Kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

3. Solusi yang dapat dilakukan agar mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

## F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan,
- b. menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan terkait evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

#### b. Bagi Guru

Memberikan masukan terkait masalah dalam proses kegiatan belajar mengajar guru dan sebagai masukan guru dalam meningkatkan kinerjanya.

c. Bagi Komite Sekolah

Memberikan informasi terkait jalannya kegiatan sekolah dan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan

d. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama kuliah terhadap permasalahan yang ada di sekitar khususnya dalam bidang pendidikan di sekolah.
- 2) Memberikan tambahan wawasan peneliti sebagai persiapan menjadi calon pendidik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Evaluasi**

###### **a. Pengertian Evaluasi**

Stufflebeam dan Shinkfield (dalam Eko Putro Widoyoko 2011: 3) menyatakan bahwa:

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.

Menurut Ralph Tyler (dalam Suharsimi Arikunto 2009: 3) “Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai.” Sedangkan menurut Wirawan (2012: 7) evaluasi adalah:

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, evaluasi adalah upaya untuk mengukur suatu aktivitas atau program dengan kriteria. Proses ini membandingkan keberhasilan yang dicapai dengan keberhasilan yang diharapkan.

### **b. Pengertian Evaluasi Program**

Program adalah kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan. Apabila program dikaitkan dengan evaluasi maka evaluasi program adalah kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (2009: 22) memaparkan empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu : a) menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; b) merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit); c) melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat; d) menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu program tertentu yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

### c. Model-model Evaluasi Program

#### 1) Evaluasi Berbasis Tujuan

Evaluasi berbasis tujuan atau dalam Bahasa Inggris disebut *Goal Based Evaluation Model* menurut Scriven (dalam Wirawan 2011: 81) adalah setiap jenis evaluasi berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan program, orang ataupun produk. Secara umum, evaluasi berbasis tujuan mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program ataupun proyek dapat dicapai atau tidak. Evaluasi ini memfokuskan pada pengumpulan informasi untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan.

#### 2) Evaluasi Formatif dan Sumatif

Model evaluasi formatif dan sumatif dilakukan ketika kebijakan, program atau proyek mulai dilaksanakan (evaluasi formatif) sampai akhir pelaksanaan program (evaluasi sumatif). Evaluasi formatif menurut Scriven (dalam Wirawan 2011: 86) adalah balikan dalam memperbaiki suatu produk ketika sedang dikembangkan. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik, mengukur apakah partisipan bergerak ke arah yang direncanakan, mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana, menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan dan

memberikan balikan secara terus menerus untuk memperbaiki perencanaan, standar prosedur operasi, penggunaan sumber-sumber dan pengembangan pelaksanaan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi sumatif bertujuan untuk mengukur kinerja akhir objek evaluasi.

### **3) Evaluasi Model Stake (*Countenance Model*)**

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2000: 22) “Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan evaluasi ialah, *Descriptions* dan (*Judgments*), dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan , yaitu *Antecedents (Context)*, *Transaction (Process)*, dan *Outcome (Output)*. ”

Menurut Stake, ketika elevator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu:

- a) Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama.
- b) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang dipertunjukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

### **4) Evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*)**

Stafflebeam (dalam Wirawan. 2011: 92) model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi sumatif yang terdiri dari:

- a) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program.
- b) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) digunakan untuk mendeksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
- d) Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

**5) Evaluasi Model Ketimpangan/Kesenjangan (*The Discrepancy Evaluation Model*)**

Evaluasi model ketimpangan pada dasarnya memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep evaluasi berbasis tujuan. Dalam evaluasi model ketimpangan memerlukan 6 langkah untuk melaksanakannya, yaitu:

- a) Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi ideal dari objek evaluasi.
- b) Merencanakan evaluasi menggunakan model evaluasi *discrepancy*. Menentukan informasi yang diperlukan untuk membandingkan implementasi yang sesungguhnya dengan standar kinerja objek yang dievaluasi.
- c) Menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan program, hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif.
- d) Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan antara standar dengan hasil pelaksanaan objek evaluasi yang sesungguhnya dan menentukan rasio ketimpangan.
- e) Menentukan penyebab ketimpangan antara standar dengan kinerja objek evaluasi.
- f) Menghilangkan ketimpangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap implementasi objek evaluasi.

## 2. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan menurut James E. Anderson (dalam AG. Subarsono 2005: 2) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Thomas Dye (dalam Joko Widodo 2006: 12) mendefinisikan

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsep Thomas Dye ini masih sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik.

Lingkup kebijakan publik sangat luas mencakup berbagai bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang kesehatan, transportasi, pertanian, kesehatan, pertahanan, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota. (Budi Winarno 2007: 3)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan yang di dalamnya mengatur perintah-perintah mengenai apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

### **b. Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Kerangka kerja kebijakan publik menurut AG. Subarsono (2005: 7-8), ditentukan oleh 6 variabel, yaitu:

1) Tujuan yang akan dicapai

Apabila tujuan yang akan dicapai semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Begitu pula sebaliknya, semakin sederhana tujuan yang ingin dicapai maka semakin mudah mencapainya.

2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai nilai akan lebih sulit dicapai dibandingkan dengan kebijakan yang hanya mengandung 1 nilai saja.

3) Sumberdaya yang mendukung kebijakan

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, infratruktur, dan sebagainya.

4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan

Kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya

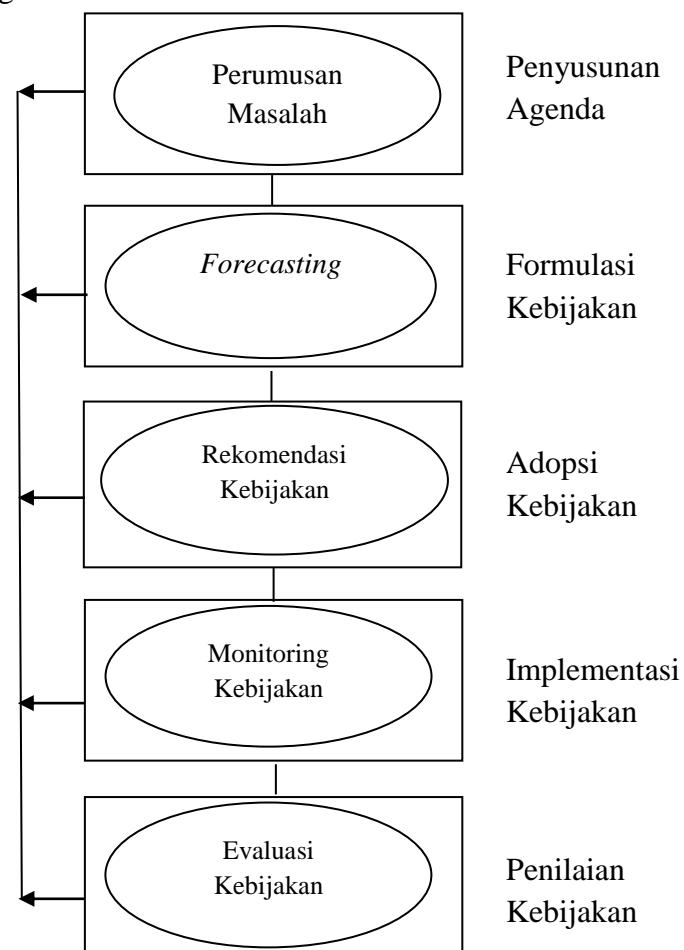
Kinerja suatu kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan diimplementasikan.

6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Strategi dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*

### c. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politis. William Dunn (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 20). Aktivitas politis tersebut nampak dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Proses Kebijakan Publik**

Sumber: Willian Dunn (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 20).

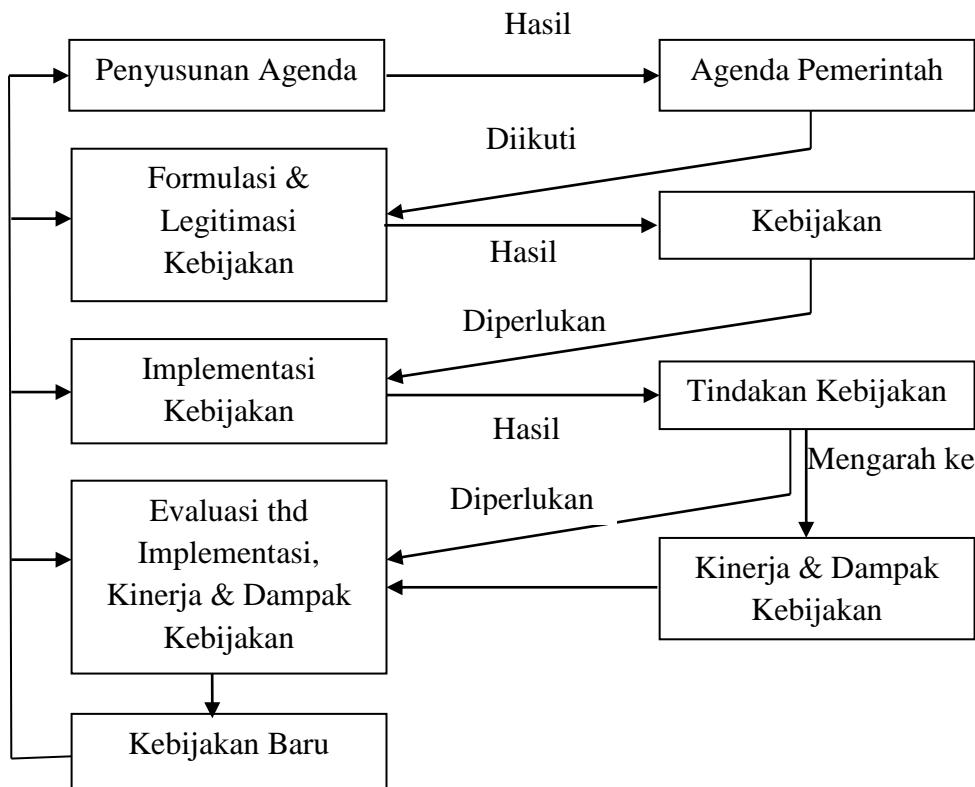
Aktivitas Politik meliputi serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kegiatan. Aktivitas yang lebih bersifat intelektual adalah perumusan kebijakan, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan.

**Tabel 1. Tahap Analisi Kegiatan**

<b>Tahap</b>	<b>Karakteristik</b>
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
<i>Forecasting</i>	Memberikan informasi mengenai konsekuensi yang akan datang dari diterapkannya suatu kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling banyak
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan serta informasi mengenai kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja dan hasil dari suatu kebijakan

Sumber: Subarsono (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 21)

Pandangan Ripley (dalam AG. Subarsono 2005: 11) tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik**

Sumber: Ripley (dalam AG. Subarsono 2005: 11)

Penyusunan kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu: 1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah; 2) membuat batasan masalah; dan 3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah

kebijakan yang dipilih. Tahap implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik, diperlukan mekanisme sanksi dan insentif. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan. Proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Dari hasil evaluasi akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan dimasa yang akan datang.

James Anderson (dalam AG. Subarsono 2005: 12-12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah? Bagaimana cara masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentu kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka lakukan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5) Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan pembatalan atau perubahan?

Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam AG. Subarsono 2005: 12) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*): suatu proses agar masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*): proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*): proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*): proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*): proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja suatu kebijakan.

Berdasarkan berbagai tahapan atau proses kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat dikatakan proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan serta pembuatan kebijakan baru.

#### **d. Lingkungan Kebijakan**

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kebijakan. Tuntutan terhadap kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan kemudian ditransformasikan ke dalam sistem politik. Faktor tersebut adalah: karakteristik geografi, variabel demografi, kebudayaan politik, struktur sosial dan sistem ekonomi. Dalam kasus tertentu lingkungan internasional dan kebijakan internasional dapat menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. James Anderson (dalam AG. Subarsono 2005: 15).

#### **e. Jenis-jenis Kebijakan Publik**

Secara tradisional, pakar ilmu mengkategorikan kebijakan publik ke dalam beberapa kategori yaitu: 1) kebijakan substantif (misal: kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, masalah luar negeri dan lain sebagainya); 2) kelembagaan (misal: kebijakan legislatif, yudikatif dan departemen); 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misal: kebijakan orde lama, orde baru dan masa reformasi).

Kategori lain dibuat oleh James Anderson (dalam AG. Subarsono 2005: 19-21) sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- 2) Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan terhadap perilaku kelompok masyarakat atau individu. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkret pada kelompok sasaran. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan publik adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penyediaan barang atau pelayanan publik. Kebijakan privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

### **3. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dalam arti luas adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan

kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program kebijakan. Implementasi pada pengertian lain yaitu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai *outcome*. Lester dan Stewart (dalam Budi Winarno 2007: 144-145)

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno 2007: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan undang-undang setelah ditetapkan pemerintah oleh individu, kelompok maupun institusi guna mencapai tujuan-tujuan atau program-program kebijakan.

### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel atau faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan. Para ahli juga merumuskan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya:

### **1) Teori George C. Erward III (1980)**

Pandangan Erward III (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 31-34), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa tujuan dan sasaran kebijakan.

b) Sumberdaya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila implementor kekurangan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Implementor harus memiliki disposisi yang baik agar dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **2) Teori Merilee S. Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam AG. Subarsono 2005: 93) dipengaruhi 2 variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan mencakup: a) sejauh mana kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; b) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; c) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; d) apakah letak sebuah program sudah tepat; e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan f) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; b) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## **3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)**

Mazmanian dan Sabatier (dalam AG. Subarsono 2005: 94-99) mengemukakan bahwa ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a) Karakteristik masalah adalah mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan, meliputi:

- (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
  - (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya homogen. Begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program akan berbeda.
  - (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Mudah tidaknya program dapat diimplementasikan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah kelompok sasaran.
  - (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b) Karakteristik kebijakan adalah kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, meliputi:
- (1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Begitu pula sebaliknya, ketidakjelasan isi

kebijakan akan menimbulkan distorsi dalam implementasi kebijakan.

(2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis memiliki sifat lebih mantab karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu ada modifikasi.

(3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan.

Setiap program memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.

(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasinya.

(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

(6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

- c) Lingkungan kebijakan adalah variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi, meliputi:
- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang telah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga akan membantu keberhasilan proses implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
  - (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang biasanya memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, begitu pula sebaliknya.
  - (3) Sikap dari kelompok pemilih terhadap sebuah kebijakan. Kelompok pemilih dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dengan cara melakukan intervensi terhadap keputusan agar mengubah keputusan. Kelompok pemilih juga dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana.
  - (4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling penting. Aparat badan pelaksana

harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasikan prioritas tersebut.

#### **4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Meter dan Horn (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 38-44) mengemukakan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Standar dan sasaran pendidikan. Standar dan sasaran harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b) Sumberdaya. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun non-manusia.
- c) Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program memerlukan dukungan, kerjasama dan koordinasi antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi.
- e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. variabel ini mencakup sejauh mana kelompok-kelompok yang berkepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan apakah menerima atau menolak, bagaimana opini publik yang ada di lingkungan, apakah elite politik mendukung implementasi serta dukungan dari sumberdaya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan program.

f) Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup respons implementor terhadap kebijakan, kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor atau preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Berdasarkan berbagai variabel atau faktor-faktor yang dikemukakan oleh berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, lingkungan kebijakan dan hubungan antar organisasi. Kompleksitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut. Masing-masing faktor saling berinteraksi satu sama lain.

#### **4. Sistem Pelayanan Publik**

##### **a. Pengertian Pelayanan Publik**

Berdasarkan sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan baik itu barang maupun jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Melihat adanya pergeseran pemerintah, korporasi dan satuan sosial ekonomi lainnya dalam penyelenggaran layanan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, mendefinisikan pelayanan publik sebagai pelayanan pemerintah menjadi kurang tepat.

Agus Dwiyanto (2010: 18-23) mengemukakan bahwa terdapat 2 kriteria dalam menentukan apakah suatu pelayanan dikatakan sebagai pelayanan publik atau bukan. Kriteria pertama adalah sifat dari barang

itu sendiri. Barang dan jasa yang sangat penting bagi kehidupan warga masyarakat luas harus disediakan oleh negara sehingga pelayanan tersebut menjadi bagian dari pelayanan publik. Misalnya, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan preventif dan dasar, pertahanan negara, pembersihan pencemaran udara dan pembangunan jalan umum. Kriteria kedua yaitu tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi negara, walaupun barang dan jasa tersebut bersifat privat dapat dikatakan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sesuai dengan pengertian pelayanan publik tersebut maka ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Pelayanan barang publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 meliputi:

- 1) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau

- seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembbiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 meliputi:

- 1) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
- 2) Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Berdaarkan pengertian, kriteria dan ruang lingkup di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan barang publik, jasa publik atau administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara baik pemerintah pusat maupun daerah atau oleh badan usaha milik negara dan daerah atau oleh institusi lain dengan anggaran berasal dari APBN atau APBD.

### **b. Standar Pelayanan**

Agar warga masyarakat di daerah memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya

maka pemerintah pusat perlu membuat kebijakan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh daerah. Melalui SPM pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal sama seperti yang dirumuskan dalam SPM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2005, Standar pelayanan mengatur aspek *input* (masukan), *process* (proses), *output* (hasil) dan/atau manfaat. *Input* penting untuk distandarisasi karena kuantitas dan kualitas dari *input* pelayanan berbeda-beda antar daerah. Hal ini sering menyebabkan ketimpangan antar daerah. Standar proses pelayanan juga penting untuk diatur. Standar proses dirumuskan untuk menjamin pelayanan publik di daerah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan. Menurut Agus Dwiyanto (2010: 37-40), prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan meliputi transparan, non-partisipan, efisien dan akuntabel. Standar *output* pelayanan sangat penting diatur. Standar output dapat digunakan untuk menilai apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum. Penentuan standar output harus memperhatikan tujuan dan nilai

yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan layanan dan juga kapasitas yang dimiliki setiap daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dan harus dipenuhi oleh penyelenggara baik aspek *input, process* dan *output*.

## **5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar**

### **a. Pengertian SPM Pendidikan Dasar**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar atau SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar adalah kewenangan kabupaten/kota. SPM pendidikan ini merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target baik tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota Penerapan. SPM Pendidikan ini bertujuan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip penyusunan SPM Pendidikan terdapat dalam Lampiran 1 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 2) diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 3) menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;
- 4) merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya;
- 5) bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;
- 6) ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

#### **b. Indikator Pencapaian SPM Pendidikan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, dalam penyelenggaraan SPM Pendidikan terdapat berbagai indikator yang terbagi menjadi 2 kelompok indikator yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Sesuai dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, SPM Pendidikan Dasar harus telah tercapai 100 persen. Oleh karena itu seluruh sekolah SD hingga SMP di Indonesia harus telah memenuhi kualifikasi dalam SPM.

## B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini perlu dibahas karena sangat berguna dalam memberikan masukan dan sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah

1. Jurnal dari Herpikus yang berjudul Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau belum berjalan maksimal, karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia baik tenaga pengajar maupun kepala sekolah. Kepala sekolah di Kabupaten Sanggau yang memenuhi kualifikasi S1 atau D IV hanya mencapai 22,96% dan guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D IV hanya mencapai 26,30%. Ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sanggau juga masih belum memadai. Hanya 59,92% sekolah di Kabupaten Sanggau yang sarana prasarananya sudah memadai. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek yang akan diteliti yaitu, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada sampel dan populasi penelitian. Dalam penelitian ini meneliti SPM dalam tingkat Kabupaten sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti hanya 1 sekolah saja.
2. Jurnal dari Herwin yang berjudul Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di

Kecamatan Sangir sampai tahun 2010 belum sepenuhnya mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan analisis gap, analisis keselarasan pembiayaan pendidikan, analisis proyeksi pencapaian SPM dan MDGs Tahun 2015 di Kecamatan Sangir. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek yang akan diteliti yaitu Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian serta subjek dan populasi yang diteliti serta analisisnya. Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

3. Tesis dari Wara Winartiningsih yang berjudul Evaluasi Implementasi Standar Isi Program Keahlian Teknologi Informasi di SKM Bertaraf Internasional Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Isi telah dilaksanakan dengan baik oleh SMKBI di Yogyakarta. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Standar Isi dari segi pelaksanaan, kendala dan masukan atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dari sisi pelaksanaan, kendala dan solusi. Persamaan lain dari model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi kesenjangan atau ketimpangan. Perbedaannya terletak dari objek yang diteliti, dalam penelitian ini meneliti Standar Isi sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti Standar Pelayanan Minimal.

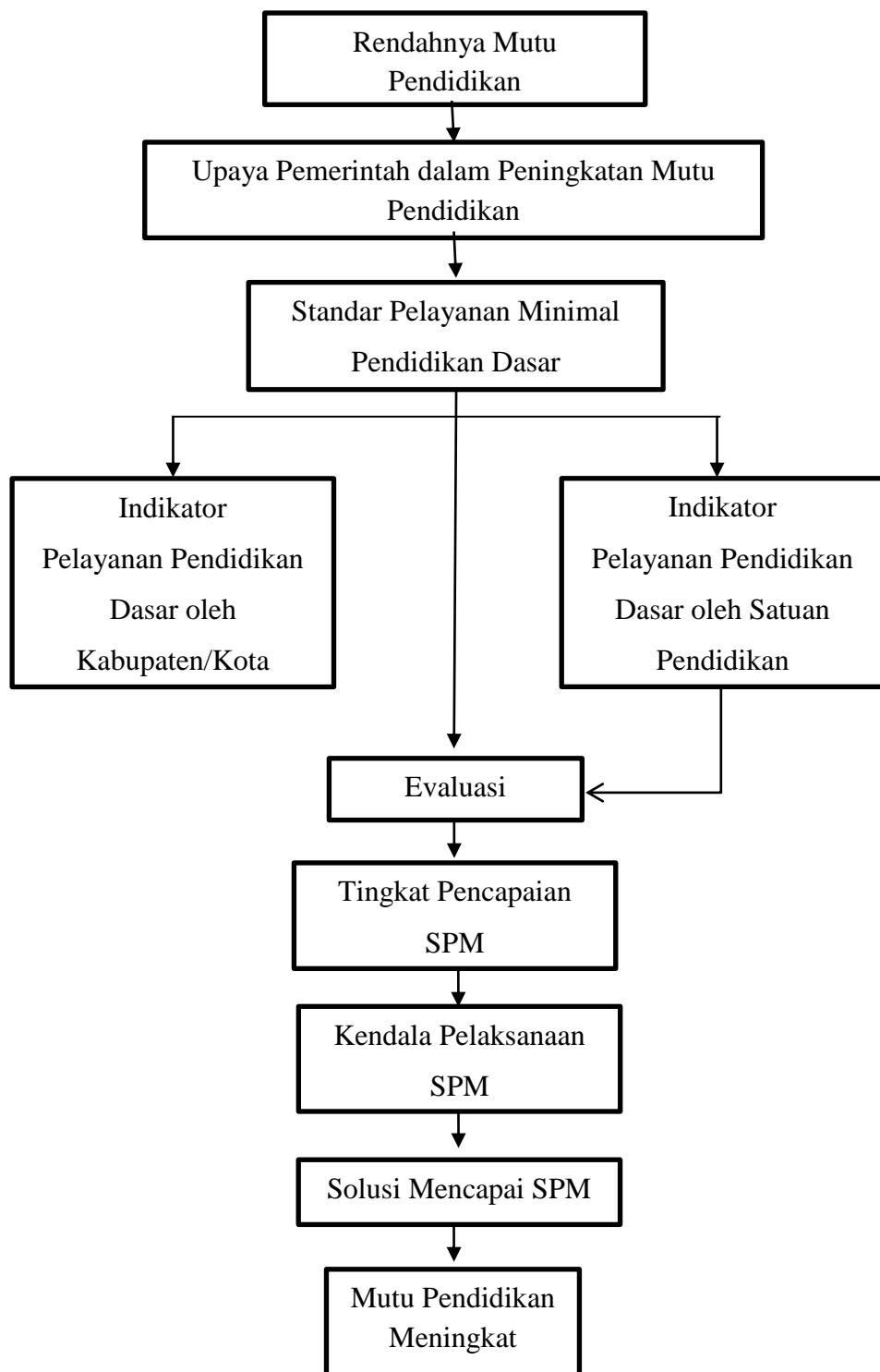
### C. Kerangka Berpikir

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya dengan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tersebut terdapat berbagai indikator yang terbagi dalam pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Dengan indikator-indikator tersebut dapat diketahui apakah sekolah telah memenuhi SPM atau belum.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada akhir tahun 2014 kualitas dan relevansi pendidikan harus meningkat salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Mnimal menjadi 100%. Dengan adanya SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan. Karena pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan dan mewujudkan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, maka perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan. Penelitian ini meneliti pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan instrumen atau indikator

penyelenggaraan SPM untuk satuan pendidikan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Model evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi model ketimpangan/kesenjangan yaitu membandingkan SPM Pendidikan Dasar dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Setelah diketahui bagaimana pelaksanaan SPM di sekolah, ditentukan berapa tingkat pencapaiannya dan kendala apa yang menyebabkan pelaksanaan SPM belum mencapai 100%. Dan bagaimana cara atau solusi menghilangkan ketimpangan tersebut agar sekolah dapat mencapai SPM.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 3. Skema Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 36-37) evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria setelah itu diambil kesimpulan. Evaluasi program yang digunakan dalam penelitian evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini adalah model evaluasi ketimpangan atau kesenjangan (*The Discrepancy Evaluation Model*) karena penelitian ini akan membandingkan pelaksanaan SPM dengan kriteria atau indikator menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Menurut Saifuddin Azwar (2005: 7), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

Alasan pemilihan sekolah ini karena, 1) SD Unggulan Muhammadiyah Kretek merupakan sekolah yang masih baru berdiri dan belum pernah melakukan pengisian data mengenai Standar Pelayanan Minimal sehingga cocok untuk dilakukan penelitian mengenai SPM. 2) Walaupun sekolah ini masih baru, namun animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini cukup tinggi. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2014.

## **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sesuai dengan batasan masalah dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki satu variabel atau variabel tunggal, yaitu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar atau SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dilihat dari ketercapaian indikator-indikator dalam SPM Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan yang terdiri dari:

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia

- (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
    - a. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
    - b. Kelas III : 24 jam per minggu;
    - c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
    - d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
  7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diajarnya;
  9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
  11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
  13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Karena poin 2 merupakan indikator SPM Pendidikan Dasar untuk tingkat SMP maka poin 2 tidak digunakan untuk menilai SPM pada SD.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber tempat diperolehnya data dan keterangan penelitian. Yang dimaksud dengan subjek menurut Spradley

(dalam Basrowi dan Suwandi 2008: 188) adalah sumber informasi. Maka subjek yang menjadi sumber data penelitian ini adalah pihak-pihak yang berada di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek yang terdiri dari kepala sekolah dan guru.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut HM. Sonny Sumarsono (2004: 69) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya, sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh oleh pengumpul data secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan beberapa cara, yaitu:

#### 1. Observasi

Metode observasi menurut Burhan Bungin (2007: 115) adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera baik mata maupun panca indera yang lainnya. Dengan kata lain, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam pengumpulan data dengan observasi non partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode observasi non partisipan untuk memperoleh data

lengkap mengenai kondisi umum lingkungan sekolah, sarana dan prasarana sekolah dan kegiatan proses belajar mengajar dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

## 2. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158), metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mendukung dalam penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk meneliti benda-benda tertulis, laporan-laporan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimiliki SD Unggulan Muhammadiyah Kretek meliputi dokumen sekolah mengenai sejarah berdirinya sekolah, data Evaluasi Diri Sekolah (EDS), KTSP, Jadwal Pelajaran, RIPS, RKAS, RKT dan data-data lain yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

## 3. Wawancara

Menurut HM. Sonny Sumarsono (2004: 71) pengumpulan data dengan wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan dan juga dijawab secara lisan. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk memperoleh

informasi tambahan mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini berisi indikator pencapaian (IP) pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar yang digunakan sebagai pedoman saat melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan membandingkan SPM yang terdapat dalam lembar observasi, dokumentasi dan wawancara ini dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar. Kisi-kisi instrumen indikator pencapaian (IP) SPM Pendidikan Dasar dengan observasi, dokumentasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Instrumen Penelitian**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Subjek Wawancara
1.	Sarana dan Prasarana	Indikator Pencapaian 1	Dokumentasi	
2.		Indikator Pencapaian 3	Observasi	
3.		Indikator Pencapaian 4	Observasi	
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indikator Pencapaian 5	Dokumentasi	
5.	Kurikulum	Indikator Pencapaian 6	Dokumentasi	
6.		Indikator Pencapaian 7	Wawancara dan Dokumentasi	Kepala Sekolah
7.		Indikator Pencapaian 8	Wawancara	Guru
8.	Penilaian Pendidikan	Indikator Pencapaian 9	Wawancara dan Dokumentasi	Guru
9.	Penjaminan Mutu	Indikator Pencapaian 10	Wawancara	Kepala Sekolah dan Guru
10.		Indikator Pencapaian 11	Dokumentasi	
11.		Indikator Pencapaian 12	Wawancara	Kepala Sekolah
12.	Manajemen Sekolah	Indikator Pencapaian 13	Wawancara dan Dokumentasi	Kepala Sekolah

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data atau informasi yang diperoleh selama observasi, wawancara dan dokumentasi dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dengan membandingkan SPM Pendidikan Dasar dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek.

Data dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penskoran atau penilaian. Menurut Riduwan (2011: 89) hasil penskoran dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif presentase. Tujuan penggunaan metode analisis deskriptif presentase adalah untuk memberikan gambaran ketercapaian pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Rumus deskriptif presentase (kuantitatif) adalah sebagai berikut:

$$DP = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

DP = Deskriptif presentase

n = Skor empiric (skor yang diperoleh)

N = Skor ideal

Tabel 13. Klasifikasi kategori

No.	Rentang	Keterangan
1.	100%	Sangat Baik
2.	60% - 99%	Baik
3.	30% - 59%	Cukup Baik
4.	0 – 29%	Kurang Baik

Sumber: Riduwan, 2011

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi**

###### **a) Sejarah Sekolah**

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek beralamat di Mriyan, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta merupakan sekolah yang berbasis Agama Islam. Sekolah ini didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kretek pada 29 Desember 2008 dengan SK Izin Operasional tanggal 16 Juni 2011 dan SK pendirian sekolah pada tanggal 2 Januari 2012. Sekolah ini dibangun menempati bangunan bekas SD N Gading 1 yang sudah tidak terpakai dengan luas tanah 2160 m<sup>2</sup>. Sesuai dengan tujuan pendiriannya yang berbasis Agama Islam, Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek bertujuan untuk meletakkan dasar kepribadian berakhhlak mulia, kecerdasan, pengetahuan, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

###### **b) Visi Misi Sekolah**

Untuk menunjang tujuan sekolah, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memiliki visi terwujudnya sekolah yang unggul, berakhhlak mulia, cerdas, berprestasi, terampil, berbudaya, dan berkepribadian Indonesia. Sedangkan misi sekolah ini adalah a) Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif,

Menyenangkan dan Islami (PAIKEMI) agar siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; b) Membiasakan perilaku terpuji berdasarkan keimanan dan ketakwaan sebagai perwujudan akhlak mulia; c) Menciptakan fisik dan lingkungan sekolah yang baik dan kondusif agar warga sekolah merasa nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah; d) Meningkatkan gemar baca siswa melalui perpustakaan sekolah; e) Menjalin mitra dan kerja sama dengan masyarakat dan instansi lain; f) Menciptakan kesetiaan, bersikap, bertindak terhadap sosial dan budaya bangsa; g) Memberdayakan potensi seluruh warga sekolah dan lingkungan.

**c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memiliki 30 guru baik PNS, Guru Tetap Yayasan maupun Guru Tidak Tetap. Sesuai dengan tujuan sekolah yang berbasis Agama Islam, disamping memiliki guru kelas dan guru mata pelajaran seperti SD Negeri, sekolah ini memiliki beberapa guru yang mengajar tentang keagamaan seperti PAI, Iqro', Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, Tilawah, Hizbul Wathan dan Al Islam yang terdiri dari Aqidah, Akhlak, Ibadah, Tarikh, Qur'an Hadits.

**Tabel 4. Jumlah Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek**

No	Kepegawaian	Jumlah
1.	GTY	17
2.	GTT	2
3.	PNS	2
	Jumlah	21

Sumber: Data yang diolah

Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berjumlah 21 guru dengan 17 guru merupakan guru tetap yayasan, 2 guru merupakan guru tidak tetap dan 2 guru PNS yang memiliki jam mengajar yang masih kurang sehingga untuk mencukupinya mengajar di SD Unggulan Muhammadiyah Kretek. Dari awal berdirinya, kepala sekolah dasar ini adalah Drs. H. Sardji, MG namun untuk tahun ajaran 2014/2015 sudah digantikan oleh Supriyanta, S.Pd. I. Seluruh guru tetap SD Unggulan Muhammadiyah Kretek harus datang setiap hari hingga kegiatan belajar mengajar selesai, sedangkan untuk guru tidak tetap tidak diharuskan datang setiap hari sesuai dengan jam mengajarnya saja.

#### **d) Peserta Didik**

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek pada tahun ajaran 2013/2014 baru memiliki 5 kelas dengan 11 rombongan belajar dan jumlah siswa sebanyak 204 anak. Pada awal tahun berdirinya sekolah hingga tahun 2012, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek baru membuka 2 rombongan belajar untuk masing-masing kelas. Namun, pada tahun 2013 karena banyak calon siswa yang mendaftar, sekolah ini menerima siswa baru sebanyak 3 rombongan belajar.

### e) Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dapat dikatakan belum memadai. Terdapat beberapa ruang yang masih digabung dengan ruang lainnya seperti ruang TU yang masih gabung dengan ruang guru dan kepala sekolah, ruang komputer gabung dengan perpustakaan dan laboratorium. Hal ini dikarenakan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek masih kekurangan ruangan karena menempati bangunan bekas SD Negeri Gading 1 yang hanya memiliki beberapa ruang saja. Namun sekarang ini SD Unggulan Muhammadiyah Kretek sedang dalam proses membangun gedung tambahan.

## 2. Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dengan cara menganalisis data, yaitu dengan mengolah data dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan evaluasi model kesenjangan. Tahapan-tahapannya yaitu:

- a. Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi. Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menurut Permendikbud No 23 Tahun 2013 untuk satuan pendidikan yang terdiri dari 13 indikator, yaitu:

- 1) setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- 2) setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- 3) setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
- 4) setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
- 5) setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- 6) satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
  - b. Kelas III : 24 jam per minggu;
  - c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
  - d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
- 7) satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- 9) setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- 10) kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- 11) setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- 12) kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13) setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Penelitian ini dilakukan pada tingkat Sekolah Dasar, jadi indikator yang digunakan sebanyak 12 indikator karena indikator pencapaian no 2 adalah untuk jenjang SMP.

b. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model kesenjangan.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dibandingkan dengan SPM Pendidikan Dasar menurut Permendikbud No 23 Tahun 2013.

c. Menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan dan hasil penelitian. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar ini dilihat dari 6 jenis pelayanan yang terdiri dari sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, penilaian pendidikan, penjaminan mutu dan manajemen sekolah.

d. Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan-kesenjangan antara SPM Pendidikan Dasar dengan hasil pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek kemudian menentukan rasio kesenjangannya.

e. Menentukan penyebab kesenjangan antara Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar.

f. Menghilangkan kesenjangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar. Perubahan yang dimaksud adalah solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah agar mencapai SPM.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 5. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM	Jumlah Pencapaian SPM	Tingkat Kesenjangan Kesanjang	Jumlah Tingkat Kesanjang	Penyebab	Solusi / Masukan
1.	Sarana dan Prasarana	Indikator Pencapaian 1 Indikator Pencapaian 3 Indikator Pencapaian 4	83,33% 83,33% = 250%	83,33% = 250%	16,67%	16,67% x 3 = 50%	Kekurangan dana untuk pengadaan peraga IPA	Membuat skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indikator Pencapaian 5	100%	100%	0%	0%	-	
3	Kurikulum	Indikator Pencapaian 6 Indikator Pencapaian 7 Indikator Pencapaian 8	83,33% 83,33% = 250%	83,33% = 250%	16,67%	16,67% x 3 = 50%	Guru tidak selalu membuat RPP dan menerapkan RPP	Guru diwajibkan membuat RPP dari sebelum / awal semester
4.	Penilaian Pendidikan	Indikator Pencapaian 9	69%	69%	31%	31%	Penilaian tidak mengacu pada standar	Kompetensi guru ditingkatkan lagi
5	Penjaminan Mutu	Indikator Pencapaian 10 Indikator Pencapaian 11 Indikator Pencapaian 12	58,33% 3 = 175%	58,33% x 3 = 175%	41,67%	41,67% x 3 = 125%	Belum pernah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, belum pernah melaksanakan US	Kompetensi kepala sekolah ditingkatkan lagi.
6	Manajemen Sekolah	Indikator Pencapaian 13	25%	25%	75%	75%	Tidak memiliki RKT dan komite sekolah kurang berkontribusi	Komite sekolah dan pengelolaan sekolah harus lebih efektif dan efisien
Rata-Rata			72,42%		27,58%			

Sumber: Data yang diolah

a. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar secara Menyeluruh

Berdasarkan tabel 5 ketercapaian pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek secara keseluruhan sebesar 72,42%, termasuk dalam kategori baik dengan tingkat kesenjangan sebesar 27,58%.

b. Kendala Pelaksanaan SPM secara Menyeluruh

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek yaitu anggaran yang terbatas, kompetensi guru dan kepala sekolah masih kurang dan manajemen sekolah kurang efektif dan efisien.

c. Solusi Pelaksanaan SPM secara Menyeluruh

Solusi yang dapat dilakukan yaitu sekolah harus mampu menyusun skala prioritas, meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah serta pengelolaan sekolah harus lebih melibatkan komite sekolah agar dicapai manajemen sekolah yang efisien dan efektif

Pencapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan terbagi menjadi 6, yaitu:

a. Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana

**Tabel 6. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana**

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Kesenjangan
Sarana dan Prasarana	Indikator Pencapaian 1	100%	0%
	Indikator Pencapaian 3	50%	50%
	Indikator Pencapaian 4	100%	0%
<b>Rata-rata</b>		<b>83,33%</b>	<b>16,67%</b>

Sumber: Data yang diolah

### 1) Pelaksanaan

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah mencapai tingkat pencapaian 100% untuk indikator 1. Hal itu berarti untuk indikator pencapaian 1 tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangannya 0%. Ketersediaan buku teks sesuai dengan jumlah siswa yaitu sebanyak 204 set buku untuk seluruh siswa dari kelas I hingga kelas V. Pengadaan buku pegangan siswa berasal dari dana BOS Kabupaten. Buku teks yang digunakan sebagai pegangan siswa dipinjamkan oleh sekolah. Buku dikembalikan setelah Ujian Akhir Semester (UAS).

Untuk indikator pencapaian 3, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek baru memperoleh tingkat pencapaian 50%. Sekolah dimasih belum memiliki beberapa jenis peraga IPA yaitu model kerangka manusia, model tubuh manusia, dan kit IPA. Sekolah baru memiliki 10 bola dunia, contoh peralatan optik dan poster Carta IPA. Pengadaan peraga IPA berasal dari dana BOS baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 50%.

Dilihat dari jumlah buku yang dimiliki SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memenuhi SPM atau telah memperoleh tingkat pencapaian SPM sebesar 100%. Oleh karena itu, berdasarkan indikator ini, kesenjangan sebesar 0%. Buku pengayaan yang dimiliki sekolah berjumlah 1270 buku, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat banyak buku yang memiliki

judul yang sama misalnya 1 edisi majalah Kemuhammadiyah terdapat 20 buah majalah. Sedangkan buku referensi yang dimiliki oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berjumlah 165 buku. Sebagian besar buku pengayaan yang dimiliki sekolah merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Pengadaan buku referensi berasal dari dana BOS Provinsi.

## 2) Kendala

Dalam pengadaan peraga IPA, anggaran yang dimiliki sekolah tidak cukup untuk membeli peraga IPA yang harganya cukup mahal.

## 3) Solusi

Sekolah harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana.

### **b. Jenis Pelayanan Pendidik dan Kependidikan**

Seluruh guru tetap SD Unggulan Muhammadiyah Kretek bekerja 42 jam 20 menit per minggu jauh melebihi standar yaitu 37,5 jam per minggu. Berdasarkan dokumen KTSP yang dimiliki sekolah, guru bekerja pada hari Senin – Jumat dari pukul 6:45 – 14:00 dan hari Sabtu pukul 6:45 – 12:50. Karena jumlah jam bekerja melebihi standar maka tingkat pencapaian indikator ini adalah 100%. Guru tetap dan pegawai tetap diwajibkan datang setiap hari hingga kegiatan belajar mengajar selesai, namun untuk guru tidak tetap dapat datang sewaktu ada jadwal mengajar saja. Dalam indikator ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan sebesar 0%.

### c. Jenis Pelayanan Kurikulum

**Tabel 7. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum**

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Kesenjangan
Kurikulum	Indikator Pencapaian 6	100%	0%
	Indikator Pencapaian 7	100%	0%
	Indikator Pencapaian 8	50%	50%
<b>Rata-rata</b>		<b>83,33%</b>	<b>16,67%</b>

Sumber: Data yang diolah

#### 1) Pelaksanaan

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek tahun ajaran 2013/2014 belum memiliki siswa kelas VI, sehingga sampai saat ini masih kosong. Berdasarkan indikator ini, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100%. Berdasarkan kalender pendidikan yang terdapat di dokumen KTSP, jumlah minggu efektif dalam 1 tahun adalah 41 minggu dan jumlah jam kegiatan belajar telah melebihi jam minimal dalam SPM. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sekolah ini melebihi jumlah jam per minggu dalam kriteria SPM karena terdapat banyak mata pelajaran berbasis Agama Islam. Oleh karena itu, dalam indikator ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sardji Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Kretek, sekolah ini pada tahun 2013/2014 telah menerapkan KTSP. Sekolah menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum tersebut. Dalam penerapan KTSP, telah dilakukan monitoring secara berkala. Oleh karena itu, berdasarkan indikator pencapaian ini, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah

memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100% dan tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0%.

Setiap guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek terkadang menerapkan RPP dalam pembelajarannya. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru hanya memiliki garis besar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan tanpa membuat RPP terlebih dahulu. RPP wajib dibuat guru apabila ada kunjungan dari UPT atau dinas terkait. Berdasarkan indikator pencapaian ini, tingkat pencapaian sebesar 50% dan itu berarti kesenjangan sebesar 50%.

## 2) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya guru yang tidak selalu membuat dan menerapkan RPP.

## 3) Masukan

Guru diwajibkan membuat RPP dari sebelum / awal semester sehingga tugas guru ketika semester sudah dimulai dapat berkurang.

## d. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan

### 1) Pelaksanaan

Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh guru belum melaksanakan program penilaian sesuai dengan indikator pencapaian dalam SPM. Tingkat pencapaiannya baru sebesar 69% dan kesenjangan sebesar 31%. Pelaksanaan program penilaian yang dilakukan guru tidak selalu mengacu pada standar penilaian. Pengembangan instrumen penilaian tidak selalu sesuai dengan KD,

pelaksanaan penilaian tidak selalu sesuai dengan rencana, hasil penilaian juga tidak selalu digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Guru lebih fokus dalam penilaian menurut aspek kognitif saja.

### 2) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan penilaian pendidikan yaitu penilaian guru tidak mengacu pada standar.

### 3) Masukan

Guru harus meningkatkan kompetensinya.

#### e. Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu

**Tabel 8. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu**

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Kesenjangan
Penjaminan Mutu	Indikator Pencapaian 10	0%	100%
	Indikator Pencapaian 11	100%	0%
	Indikator Pencapaian 12	75%	25%
<b>Rata-rata</b>		<b>58,33%</b>	<b>41,67%</b>

Sumber: Data yang diolah

### 1) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Unggulan Muhammadiyah Kretek hanya melakukan supervisi kelas dan umpan balik apabila mendapat laporan wali murid bahwa terdapat guru yang bermasalah dalam mengajar. Dari hasil wawancara dengan seluruh guru untuk tahun ajaran 2013/2014 baik

semester I atau II, kepala sekolah belum pernah melakukan supervisi kelas dan umpan balik. Oleh karena itu, tingkat pencapaian menurut indikator ini masih 0% dan kesenjangan 100%.

Laporan hasil belajar siswa oleh masing-masing guru selalu dilaporkan kepada kepala sekolah. Laporan hasil belajar siswa dari setiap guru dikumpulkan menurut kelas. Oleh karena itu, berdasarkan indikator pencapaian ini, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memperoleh tingkat pencapaian 100%. Dalam indikator ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0%.

Berdasarkan indikator pencapaian ini, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memperoleh tingkat pencapaian sebesar 75%. Laporan UAS dan UKK telah disampaikan ke wali murid dalam bentuk raport oleh kepala sekolah melalui guru kelas, sedangkan rekapitulasinya telah disampaikan ke Dinas Pendidikan. Namun karena sekolah ini belum pernah melakukan ujian sekolah, maka sekolah ini belum pernah melaporkan hasil US dan rekapitulasinya kepada wali murid dan Dinas Pendidikan Dasar. Kesenjangan dalam pelaksanaan indikator pencapaian ini sebesar 25%.

## 2) Kendala

Kepala sekolah belum pernah melakukan supervisi baik pada semester 1 maupun semester 2.

### 3) Solusi

Kompetensi kelapa sekolah harus ditingkatkan lagi.

## f. Jenis Pelayanan Manajemen Sekolah

### 1) Pelaksanaan

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan indikator pencapaian ini hanya memperoleh tingkat pencapaian sebesar 25% karena sekolah ini hanya memiliki komite sekolah saja. Sekolah hanya membuat Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) Tahun 2009-2014 tanpa membuat Rencana Kerja Tahunan (RKS). Program dan kegiatan sekolah hanya mengacu pada RIPS saja. Dalam pelaksanaan indikator pencapaian ini kesenjangan sebesar 75%.

### 2) Kendala

Sekolah tidak memiliki Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan komite sekolah kurang berkonstribusi.

### 3) Solusi

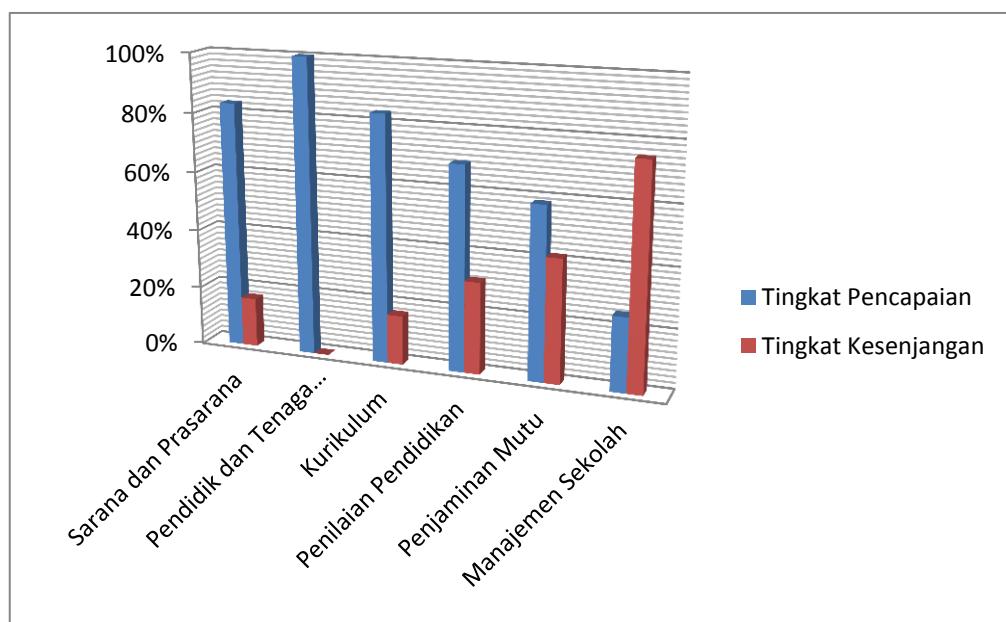
Komite sekolah dan pengelolaan sekolah harus lebih efektif dan efisien.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek

#### a. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar

Secara menyeluruh, keterlaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek tingkat pencapaian pelaksanaan SPM berdasarkan jenis pelayanan adalah sebagai berikut:



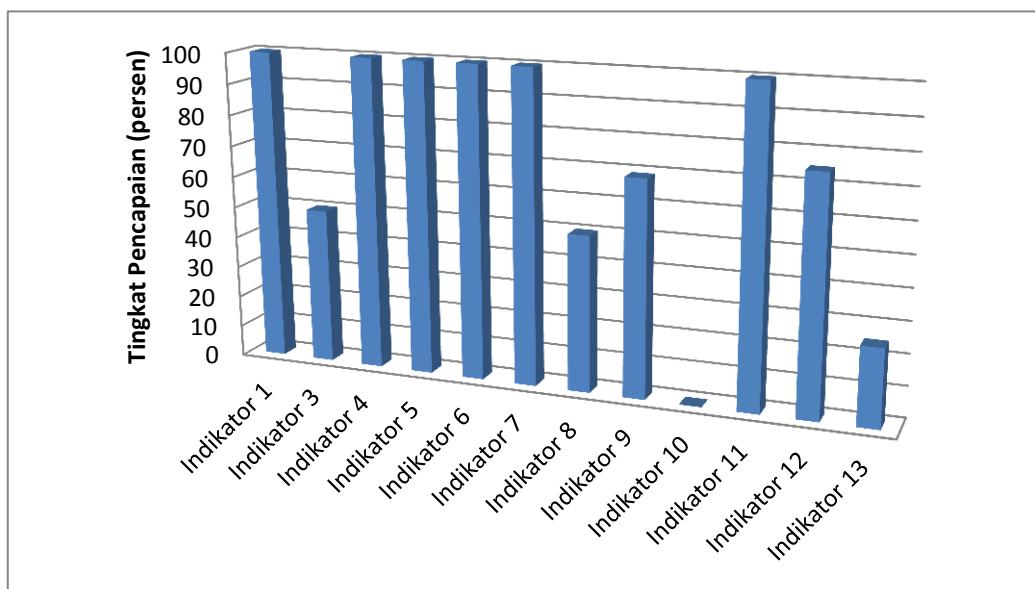
**Gambar 4. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Berdasarkan Jenis Pelayanan**

Sumber: Data yang diolah

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan jenis pelayanan terlihat bahwa sebagian besar perbandingan tingkat pencapaian dengan tingkat kesenjangan lebih besar tingkat pencapaian. Namun, untuk jenis

pelayanan manajemen sekolah, tingkat pencapaian lebih rendah dibanding dengan tingkat kesenjangan. Tingkat pencapaian SPM Pendidikan Dasar paling tinggi yaitu berdasarkan jenis pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tingkat pencapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%. Tingkat pencapaian SPM Pendidikan Dasar paling rendah yaitu berdasarkan jenis pelayanan manajemen sekolah hanya memperoleh tingkat pencapaian sebesar 25% dengan kesenjangan sebesar 75%.

Tingkat pencapaian pelaksanaan SPM berdasarkan tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

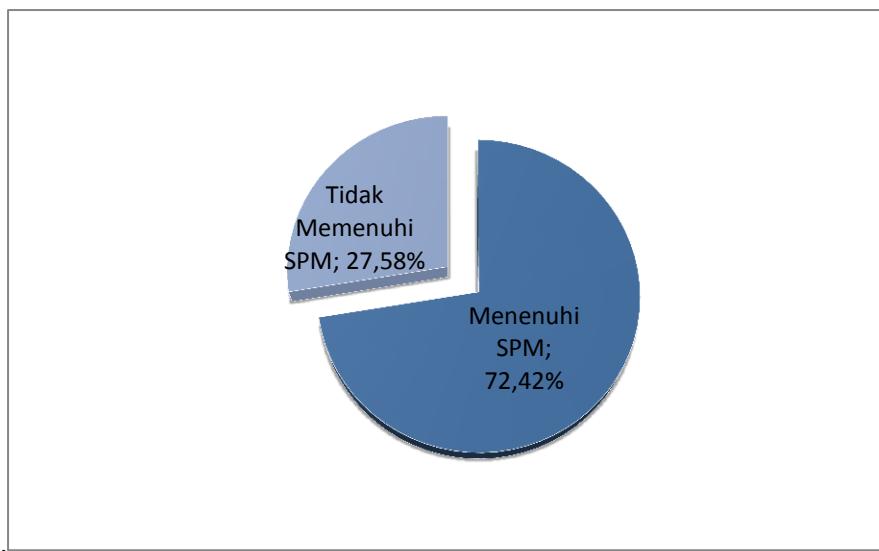


**Gambar 5. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Berdasarkan Indikator Pencapaian**

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa SD Unggulan Muhammadiyah Kretek baru memenuhi 6 indikator pencapaian dan 6

indikator pencapaian belum terpenuhi. Menurut tingkat pencapaian secara umum, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memperoleh skor 72,42%. Apabila dikriteriakan, pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek masuk dalam kategori baik. Berdasarkan penghitungan kesenjangan menurut Permendikbud No 23 Tahun 2013 kesenjangan disetiap sekolah dihitung dari selisih antara ketercapaian IP (indikator pencapaian) oleh sekolah dengan standar yang ditetapkan dalam SPM. Sekolah dapat memenuhi SPM apabila telah memenuhi seluruh indikator pencapaian atau memperoleh nilai tingkat pencapaian sebesar 100%. Oleh karena itu, kesenjangan SD Unggulan Muhammadiyah dalam pencapaian SPM sebesar 27,58%.



**Gambar 6. Diagram Ketercapaian SPM SD Unggulan Muhammadiyah Kretek**

Sumber: Data yang diolah

### **b. Kendala Pencapaian SPM Pendidikan Dasar**

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek menurut beberapa indikator masih belum memenuhi SPM. Dari segi sarana dan prasarana, SPM belum terpenuhi dalam hal ketersediaan peraga IPA. Dari segi kurikulum SPM belum terpenuhi dalam hal pelaksanaan RPP oleh guru, SPM juga belum terpenuhi dari segi penilaian pendidikan, dari segi penjaminan mutu, SPM belum terpenuhi dalam hal supervisi kepala sekolah dan laporan hasil penilaian sedangkan dari segi manajemen sekolah, SPM belum terpenuhi dalam hal Rencana Kerja Tahunan.

Peraga IPA yang dimiliki SD Unggulan Muhammadiyah Kretek saat ini baru globe, peralatan optik sederhana dan poster IPA. Kit IPA, model kerangka manusia dan model tubuh manusia belum dimiliki sekolah karena harganya yang cukup mahal. SD Unggulan Muhammadiyah Kretek sedang fokus dengan pembangunan gedung sekolah sehingga anggaran untuk membeli peraga IPA tersebut belum ada. Peraga IPA merupakan alat yang cukup penting untuk menunjang pembelajaran. Dengan peraga IPA, guru akan lebih mudah dalam menjelaskan materi pelajaran dan siswa juga dapat lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan guru. Alat peraga juga sangat diperlukan bagi terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu.

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru-guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek terkadang tidak mempersiapkan RPP terlebih dahulu. Guru hanya memiliki garis besar materi yang akan disampaikan

dan dengan metode seperti apa yang akan dilakukan dalam KBM. RPP dibuat ketika akan ada tinjauan atau kunjungan dari UPT atau pihak terkait. Keterbatasan waktu menjadi alasan mengapa guru tidak mempersiapkan RPP sebelum memulai KBM. Dengan tidak adanya RPP, maka guru akan kesulitan dalam mencapai tujuan dalam proses belajar mengajar. Guru juga belum mengembangkan dan menerapkan penilaian sesuai standar. Guru hanya fokus dengan penilaian dalam aspek kognitif saja.

Indikator 10 yaitu mengenai supervisi kepala sekolah belum memenuhi SPM karena kepala sekolah sangat jarang melakukan supervisi kelas terhadap guru-guru. Kepala sekolah akan melakukan supervisi ketika terdapat laporan dari wali murid apabila ada guru yang bermasalah dalam mengajarnya. Kepala sekolah juga beranggapan bahwa supervisi yang dilakukan pengawas sudah menyeluruh sehingga tidak perlu lagi supervisi oleh kepala sekolah. Karena tidak ada supervisi maka kepala sekolah tidak dapat mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi guru dan proses kegiatan belajar mengajar seperti apa yang dilakukan guru. Dengan supervisi yang efektif maka akan meningkatkan profesionalisme guru dan apabila terdapat permasalahan yang ditemui dari hasil supervisi dapat dipecahkan bersama-sama.

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek belum memenuhi indikator SPM mengenai laporan hasil belajar oleh kepala sekolah karena baru berjalan 5 tahun sehingga belum pernah meluluskan siswanya. Oleh

karena itu, sekolah ini belum pernah melaporkan hasil ujian akhir (US) ke orang tua murid dan rekapitulasinya ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama.

Dalam hal manajemen sekolah, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek memperoleh nilai capaian sangat rendah. Hingga tahun ajaran 2013/2014 hampir berakhir, sekolah ini belum membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kegiatan yang dilakukan sekolah hanya mengacu pada RIPS (Rencana Induk Pengembangan Sekolah) tahun 2009-2014. Tanpa adanya RKT, pelaksanaan kegiatan sekolah tidak akan efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena tidak ada pedoman operasional sekolah yang lebih mendetail dan tanpa RKT maka tidak ada alat untuk memonitoring dan mengevaluasi.

### c. Solusi Pencapaian SPM

Guna tercapainya SPM Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek sebesar 100%, perlu beberapa langkah yang harus dilakukan. Tidak tercapainya SPM Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek secara umum disebabkan karena kurangnya informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebelumnya, belum pernah ada sosialisasi dan pembinaan mengenai penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ditemui saat penelitian tidak ada yang tahu apa itu SPM. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adanya sosialisasi mengenai SPM oleh Gubernur selaku

wakil pemerintah daerah kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui standar apa saja yang harus dipenuhi, sekolah akan lebih memprioritaskan memenuhi SPM.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Oleh karena itu kemampuan mengelola sarana dan prasarana sekolah harus dioptimalkan. Sekolah harus mampu menyusun skala prioritas dalam hal pengadaan sarana dan prasarana. Disamping buku mata pelajaran maupun buku pengayaan, alat peraga IPA merupakan sarana yang harus dimiliki sekolah.

Untuk meningkatkan kualitas SDM yang dapat dilakukan pertama adalah optimalisasi peran kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan dan mendorong guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Untuk mengetahui sejauh mana guru melaksanakan pembelajaran, kepala sekolah perlu melakukan supervisi kelas. Hasil supervisi tersebut akan dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan guru, selanjutnya dapat dilakukan pembinaan dan tindak lanjut agar kekurangan guru dapat diperbaiki dan kelebihan dapat dipertahankan. Dengan adanya supervisi, guru akan lebih mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan sehingga kasus seperti di SD

Unggulan Muhammadiyah Kretek dimana guru tidak mempersiapkan RPP terlebih dahulu dan guru tidak menerapkan program penilaian sesuai standar akan lebih berkurang.

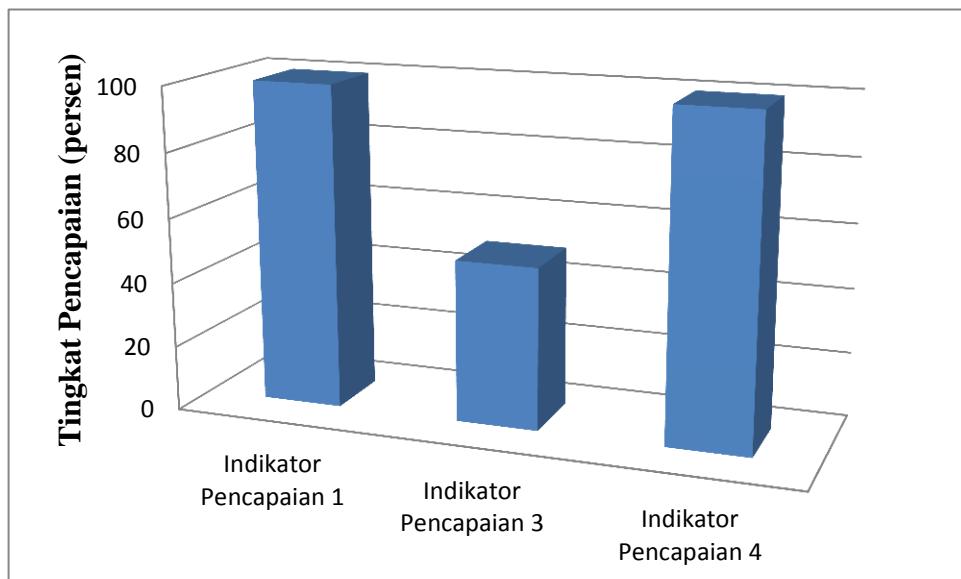
Dalam hal manajemen sekolah, agar penyelenggaraan sekolah dapat berjalan efektif dan efisien, sekolah harus mampu menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS). RKS ini terdiri dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, sekolah harus melibatkan komite sekolah. Agar Rencana Kegiatan Sekolah ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, kepala sekolah harus melakukan monitoring, evaluasi dan harus ada laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilakukan.

## **2. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Jenis Pelayanan**

### **a. Sarana dan Prasarana**

#### **1) Pelaksanaan**

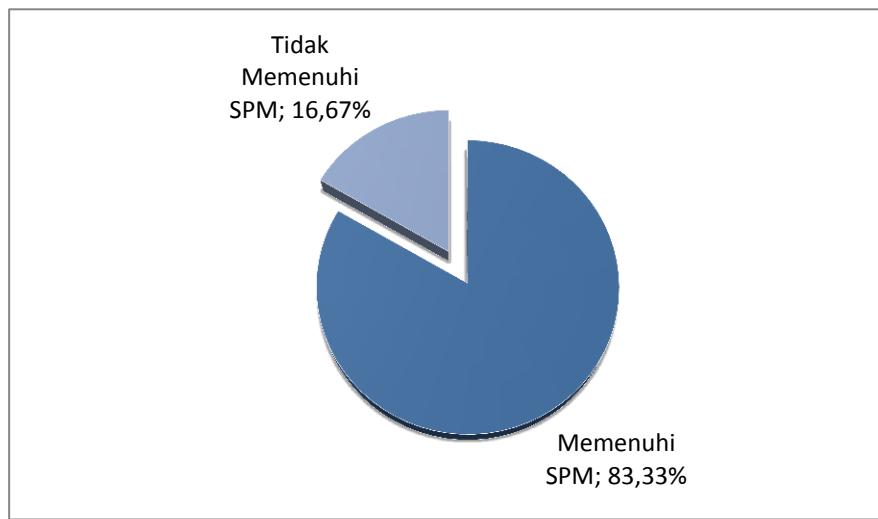
Jenis pelayanan sarana dan prasarana untuk sekolah dasar memuat 3 indikator, yaitu mengenai buku teks untuk pegangan siswa, alat peraga IPA serta buku pengayaan dan buku referensi. Keterlaksanaan SPM berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 7. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana**

Sumber: Data yang diolah

Dalam hal sarana dan prasarana, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memenuhi SPM untuk indikator 1 mengenai buku teks pegangan siswa dan indikator 4 mengenai buku pengayaan dan referensi. Namun untuk indikator 3 mengenai pengadaan peraga IPA belum memenuhi SPM. Berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana, ketercapaian SPM Pendidikan Dasar dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 8. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana**

Sumber: Data yang diolah

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana memenuhi indikator pencapaian sebesar 83,33%. Pengadaan sarana dan prasarana ini menggunakan dana BOS sehingga dalam pengadaan buku teks untuk siswa, buku pengayaan dan buku referensi dapat berjalan sesuai dengan SPM.

## 2) Rasio Kesenjangan

Kesenjangan sebesar 16,67%

## 3) Kendala

Indikator pencapaian 3 merupakan penyebab tidak tercapainya SPM Pendidikan Dasar dalam jenis pelayanan sarana dan prasarana. Keterbatasan anggaran yang dimiliki sekolah menjadi kendala dalam pemenuhan indikator pencapaian ini. Untuk pengadaan sarana dan prasarana, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek menggunakan dana BOS dari pusat, provinsi maupun

kabupaten. Namun untuk pengadaan peraga IPA yang harganya cukup mahal, dana BOS tidak mencukupi. Sedangkan dana yang berasal dari pendapatan asli sekolah hanya digunakan untuk gaji GTY/PTY, snack, makan, minum siswa dan guru, dan untuk pembangunan gedung ruang kelas.

#### 4) Solusi

Agar indikator pencapaian dalam jenis pelayanan sarana dan prasarana dapat tercapai maka sekolah harus membuat skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah membuat perencanaan pengadaan barang dimulai dari re-infentaris barang-barang, mengadakan seleksi terhadap barang-barang yang masih dapat digunakan, membuat list pengadaan barang dimulai dari barang yang terpenting dan harus segera dimiliki dan menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab dalam pengadaan barang.

### b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### 1) Pelaksanaan

Jenis pelayanan ini hanya memuat 1 indikator saja yaitu indikator pencapaian 5 yang mengatur tentang waktu bekerja untuk guru tetap. Seluruh guru tetap SD Unggulan Muhammadiyah Kretek sudah bekerja lebih dari 37,5 jam per minggu sehingga dalam indikator pencapaian ini sudah memenuhi SPM. Waktu proses belajar mengajar di sekolah ini lebih lama dibandingkan dengan sekolah lain. Hari Senin – Jumat dari pukul 6:45 – 14:00 dan hari

Sabtu pukul 6:45 – 12:50. Guru tetap diwajibkan untuk hadir setiap hari hingga proses belajar mengajar selesai.

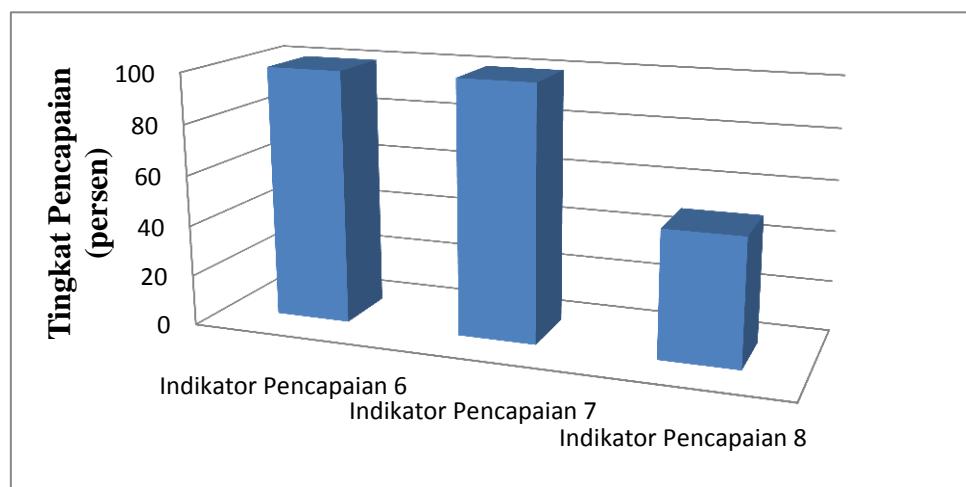
## 2) Kesenjangan

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan tidak terdapat kesenjangan. Kesenjangan sebesar 0%.

## c. Kurikulum

### 1) Pelaksanaan

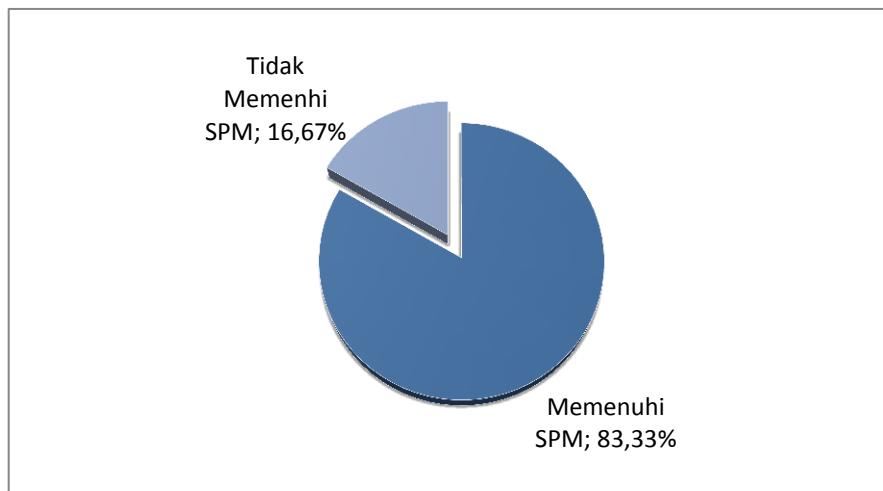
Standar Pelayanan Minimal memuat 3 indikator pencapaian mengenai jenis pelayanan kurikulum. Indikator pencapaian 6 mengenai waktu proses belajar mengajar, indikator pencapaian 7 mengenai KTSP dan indikator pencapaian 8 mengenai RPP. Keterlaksanaan SPM menurut jenis pelayanan berdasarkan kurikulum dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 9. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum**

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan jenis pelayanan kurikulum, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memenuhi SPM untuk indikator pencapaian 6 mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran dan indikator 7 mengenai KTSP. Namun untuk indikator pencapaian 8 mengenai RPP belum memenuhi SPM. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan kurikulum dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 10. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum**

Sumber: Data yang diolah

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan kurikulum memenuhi indikator pencapaian sebesar 83,33%. Penyelenggaraan proses pembelajaran sudah sesuai SPM baik dalam jumlah minggu per tahun maupun jumlah jam per minggu. Penerapan KTSP sudah sesuai dengan SPM. Sekolah menyusun, mengembangkan, melaksanakan dan memonitoring

jalannya KTSP. Hanya saja dalam pelaksanaan RPP belum sesuai dengan SPM.

2) Kesenjangan

Kesenjangan sebesar 16,67%

3) Kendala

Pelaksanaan indikator pencapaian 8 merupakan penyebab dari tidak tercapainya SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan kurikulum. Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek tidak selalu menerapkan RPP dalam pembelajarannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu untuk membuat RPP.

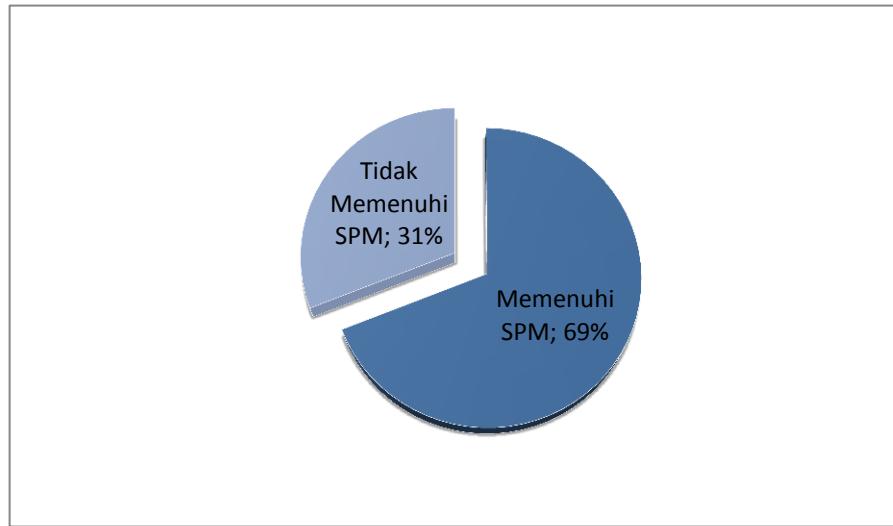
4) Solusi

Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut, kepala sekolah harus mewajibkan guru untuk mempersiapkan RPP dari awal semester. Apabila RPP dibuat sebelum awal semester dimulai maka guru tidak perlu membuat RPP setiap kali mau mengajar.

**d. Penilaian Pendidikan**

1) Pelaksanaan

Indikator dalam jenis pelayanan penilaian hanya ada satu yaitu indikator pencapaian 9 mengenai program penilaian yang dilakukan guru. Ketercapaian indikator pencapaian ini dapat dilihat dari diagram berikut:



**Gambar 11. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Penilaian Pendidikan**

Sumber: Data yang diolah

Dalam indikator 9, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek belum memenuhi SPM karena program penilaian yang dilakukan guru tidak selalu mengacu pada standar. Guru lebih memprioritaskan penilaian dalam aspek kognitif saja sebagai syarat pengisian nilai raport sehingga tingkat pencapaian indikator ini baru 69%.

## 2) Kesenjangan

Rasio kesenjangan sebesar 31%.

## 3) Kendala

Kurangnya kesadaran guru mengenai pentingnya program penilaian. Guru hanya fokus dengan pengisian nilai untuk raport tanpa memperhatikan aspek lain dalam penilaian.

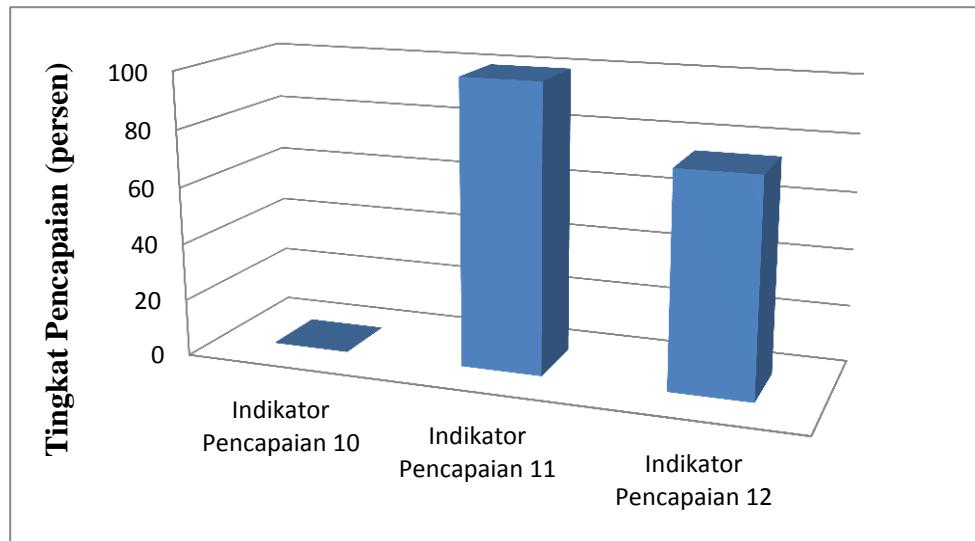
#### 4) Solusi

Untuk mengurangi kendala yang ada, guru harus menyusun rancangan penilaian yang meliputi pedoman penilaian, kriteria ketuntasan hasil belajar, rubrik penilaian. Guru juga harus menyusun instrumen penilaian dengan langkah-langkah yang tepat seperti pembuatan kisi-kisi, melakukan analisis kesesuaian penilaian dengan kompetensi yang diukur, menggunakan teknik penilaian yang tepat dan melakukan penilaian sikap.

### e. Penjaminan Mutu

#### 1) Pelaksanaan

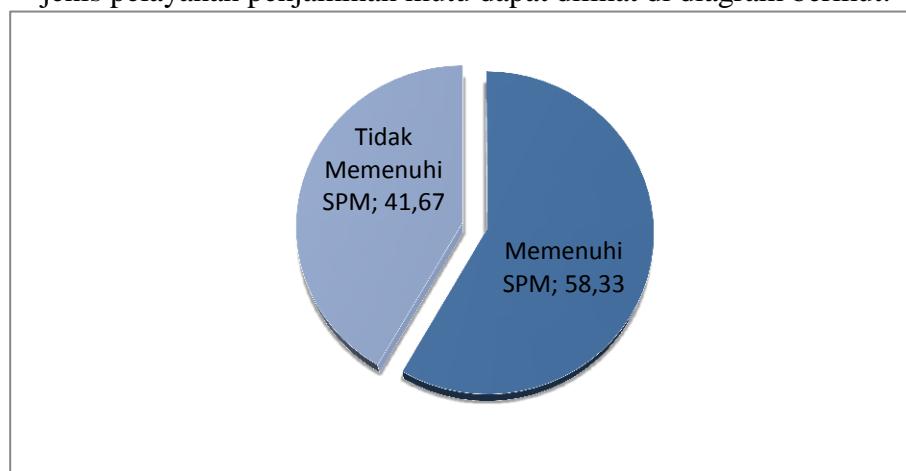
Jenis pelayanan penjaminan mutu pendidikan memuat 3 indikator. Indikator pencapaian 10 mengenai supervisi kepala sekolah, indikator pencapaian 11 mengenai laporan hasil evaluasi mata pelajaran oleh guru dan indikator 12 mengenai laporan hasil ulangan oleh kepala sekolah. Keterlaksanaan SPM menurut jenis pelayanan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 12. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Penjaminan Mutu**

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memenuhi SPM untuk indikator pencapaian 11. Namun untuk indikator pencapaian 10 dan 12 belum memenuhi SPM. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu dapat dilihat di diagram berikut:



**Gambar 13. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penjaminan Mutu**

Sumber: Data yang diolah

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu memenuhi indikator pencapaian sebesar 58,33%. Indikator 11 menyumbang nilai paling tinggi dalam ketercapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan penilaian pendidikan.

#### 2) Rasio Kesenjangan

Kesenjangan sebesar 41,67%

#### 3) Kendala

Dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu, indikator 10 masih belum memenuhi SPM karena kepala sekolah belum pernah melakukan supervisi baik semester 1 maupun semester 2. Kepala sekolah beranggapan bahwa supervisi yang dilakukan pengawas sudah menyeluruh. Sehingga kepala sekolah sudah tidak mensupervisi lagi. Tidak tercapainya SPM Pendidikan Dasar pada jenis pelayanan ini juga disebabkan karena indikator pencapaian 12 masih belum memenuhi SPM. Sekolah belum memiliki kelas 6 sehingga belum pernah melaksanakan Ujian Sekolah (US).

#### 4) Solusi

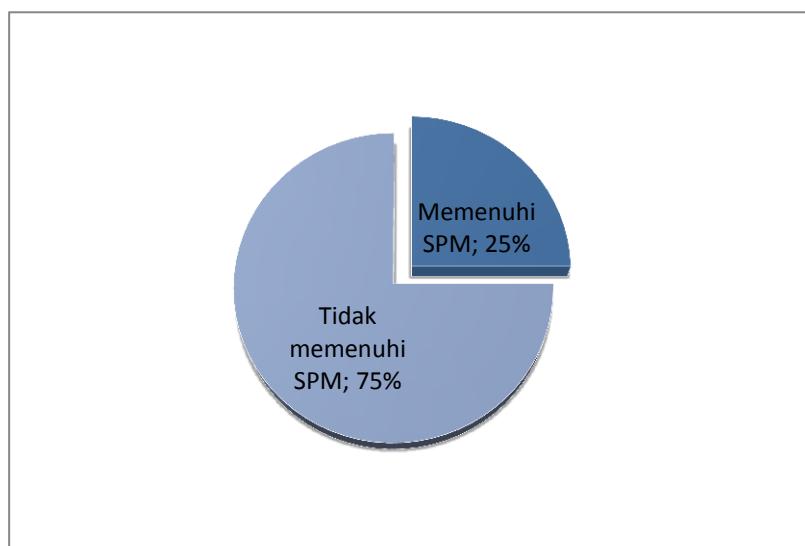
Agar pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu ini dapat terpenuhi, kompetensi kepala sekolah harus ditingkatkan lagi agar lebih mengetahui kewajiban-kewajiban kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah dapat diwakilkan oleh wakil kepala sekolah ataupun guru. Jadi apabila

kepala sekolah mengetahui hal itu dan kepala sekolah tidak memiliki waktu untuk melakukan supervisi, supervisi dapat diwakilkan kepada wakil kepala sekolah ataupun guru. Disamping itu, agar SPM terpenuhi, setelah sekolah memiliki kelas 6 dan sudah pernah melakukan ujian sekolah, sekolah harus melaporkan hasil ujian sekolah kepada wali murid dan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan

#### f. Manajemen Sekolah

##### 1) Pelaksanaan

Jenis pelayanan manajemen sekolah hanya terdiri dari 1 indikator pencapaian saja yaitu indikator pencapaian 13. Ketercapaian indikator pencapaian ini dapat dilihat dari diagram berikut:



**Gambar 14. Diagram Ketercapaian Pelaksanaan SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Manajemen Sekolah**

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan indikator ini, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek belum memenuhi SPM. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar hanya sebesar 25%. Sekolah hanya memiliki komite sekolah namun kurang berkonstribusi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Sekolah juga tidak memiliki Rencana Kegiatan Tahunan.

2) Rasio Kesenjangan

Kesenjangan sebesar 75%.

3) Kendala

Sekolah hanya memiliki komite sekolah, namun komite sekolah masih kurang berkonstribusi terhadap perkembangan sekolah.

4) Solusi

Sekolah harus lebih melibatkan komite sekolah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Sekolah. Dengan keterlibatan komite sekolah, maka dalam pelaksanaan kegiatan sekolah akan lebih efisien dan efektif. Kepala sekolah juga harus melakukan monitoring, evaluasi dan harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan sekolah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara Menyeluruh

SD Unggulan Muhammadiyah Kretek belum mencapai SPM Pendidikan Dasar karena untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, sekolah harus memperoleh tingkat pencapaian 100%. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah memenuhi SPM Pendidikan Dasar sebesar 72,42% dengan kategori baik. Sekolah ini masih belum memenuhi SPM Pendidikan Dasar sebesar 27,58%.

b. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Berdasarkan Jenis Pelayanan

Indikator pencapaian yang sudah memenuhi SPM Pendidikan Dasar adalah 6 indikator dan yang belum memenuhi SPM Pendidikan Dasar 6 indikator. Tingkat pencapaian SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana sebesar 83,33% dengan tingkat kesenjangan sebesar 16,67%. Berdasarkan jenis pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan, tingkat pencapaiannya

sebesar 100% dengan tingkat kesenjangan sebesar 0%. Berdasarkan jenis pelayanan kurikulum, tingkat pencapaiannya sebesar 16,67%. Berdasarkan jenis pelayanan penilaian pendidikan, tingkat pencapaian sebesar 69% dengan tingkat kesenjangan sebesar 31%. Berdasarkan jenis pelayanan penjaminan mutu, tingkat pencapaian sebesar 58,33% dengan kesenjangan sebesar 41,67%. Berdasarkan jenis pelayanan manajemen sekolah, tingkat pencapaiannya sebesar 25% dengan tingkat kesenjangan sebesar 75%.

2. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
  - a. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar secara Menyeluruh

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek menghadapi beberapa kendala. Kendala yang pertama yaitu kurangnya informasi yang diterima pendidik dan kependidikan mengenai SPM. Kendala kedua yaitu terkait dengan keterbatasan dana. Sekolah ini sedang fokus dengan pembangunan gedung sekolah sehingga anggaran untuk pengadaan sarana penunjang pembelajaran yang harganya mahal seperti peraga IPA belum ada. Kendala yang ketiga terkait dengan SDM. Kepala sekolah dan guru belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kendala yang terakhir yaitu pengelolaan sekolah belum efektif dan efisien. Sekolah tidak memiliki RKT sehingga dalam melaksanakan kegiatan sekolah tidak ada pedoman operasionalnya.

b. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Berdasarkan Jenis Pelayanan

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan jenis pelayanan mengalami beberapa kendala. Dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana, SD Unggulan Muhammadiyah Kretek kekurangan dana untuk pengadaan peraga IPA. Berdasarkan jenis pelayanan kurikulum, guru belum membuat dan menerapkan RPP. Berdasarkan jenis pelayanan penilaian, penilaian yang dilakukan guru belum mengacu pada standar. Berdasarkan penjaminan mutu, kepala sekolah belum pernah melakukan supervisi dan berdasarkan manajemen sekolah, sekolah tidak memiliki RKT dan komite sekolah kurang berkonstribusi.

3. Solusi/Masukan guna Pencapaian SPM

a. Solusi/Masukan guna Pencapaian SPM secara Menyeluruh

Agar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dapat mencapai SPM yang harus dilakukan yaitu mengoptimalkan peran kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan dan mendorong guru agar terus meningkatkan kompetensinya. Langkah yang kedua yaitu mengoptimalkan manajemen sekolah agar penyelenggaraan sekolah dapat berjalan efektif dan efisien.

b. Solusi/Masukan guna Pencapaian SPM secara Menyeluruh

Untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar dalam penyalinan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan yaitu membuat skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan jenis pelayanan kurikulum, guru diwajibkan membuat RPP dari sebelum atau awal semester. Berdasarkan jenis pelayanan penilaian, kompetensi guru harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan penjaminan mutu, kompetensi kepala sekolah juga harus ditingkatkan, dan berdasarkan manajemen sekolah, komite sekolah dan pengelolaan sekolah harus lebih efisien dan efektif.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sekolah dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal.

1. Untuk mewujudkan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dimana seluruh sekolah di wilayah di Indonesia dapat mencapai SPM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih mensosialisasikan mengenai SPM. Hingga pertengahan tahun 2014 masih terdapat sekolah yang tidak mengetahui apa itu SPM. Dengan sosialisasi SPM secara menyeluruh akan lebih membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanannya dan baik langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan prestasi sekolah.
2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek dalam hal sarana dan prasarana sudah

bagus. Sekolah sudah memiliki beberapa sarana penunjang pembelajaran. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengadaan sarana penunjang seperti alat peraga IPA yang masih belum dimiliki oleh sekolah. Dengan alat peraga, siswa akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Siswa tidak hanya mengetahui secara teorinya saja tetapi juga dapat melakukan praktik sendiri dengan alat peraga yang dimiliki sekolah. Karena pentingnya sarana penunjang pembelajaran, pengadaan sarana penunjang lain yang belum dimiliki sekolah sesuai dengan SPM dirasa perlu.

3. Pendidik dan tenaga kependidikan SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah bekerja dengan baik, sudah sesuai dengan jadwal dan melakukan penilaian sesuai dengan standar. Namun kualitas kepala sekolah maupun guru harus terus ditingkatkan. Guru dan kepala sekolah masih bekerja kurang sesuai dengan SPM seperti tidak menyiapkan RPP, tidak menerapkan program penilaian sesuai standar dan tidak melakukan supervisi kelas. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan dan mendorong guru agar terus meningkatkan kompetensinya.
4. SD Unggulan Muhammadiyah Kretek telah menggunakan kurikulum KTSP. Sekolah ini juga telah menyelenggarakan proses dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar. Akan tetapi sekolah tidak memiliki Rencana Kerja Tahunan, kegiatan yang dilakukan sekolah hanya berpedoman dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tahun 2009-

2014. Dengan Rencana Kerja Tahunan, sekolah akan lebih mudah dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan. Kegiatan yang dilakukan akan lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu untuk mencapai sekolah yang efektif dan efisien, sekolah setiap awal tahun ajaran baru harus sudah memiliki Rencana Kerja Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. United States of America: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamis Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.
- Farida Yusuf Tayibnatis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid Hasan. 2009. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hepikus. 2012. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. *Jurnal-PublikA*. Volume 1, Nomor 1, Desember 2013. Diakses melalui: <http://jurnalnasional.ciki.me/index.php/ian/article/viewFile/12/21> pada Jumat, 6 Desember 2013 pukul 20:25 WIB.
- Herwin. 2012. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal*. Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Diakses melalui: <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PENCAPAIAN-STANDA-PELAYANAN-MINIMAL.pdf> pada Minggu, 9 Februari 2014 pukul 20:47 WIB.
- Joko Widodo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kompas Cetak. 2011. 88,8 Persen Sekolah di Bawah Standar. Diakses melalui: <http://entertainment.kompas.com/read/2011/03/23/10321298/88.8.Persen>.

[Sekolah.di.Bawah.Standar](#) pada Jumat, 6 Desember 2013 pukul 20:28 WIB.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 *Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.*

Maria Fransiska Mali. 2013. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *ejurnal.an.fisip-unmul.* Volume 1, Nomor 4, 2013. Diakses melalui: [http://ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10/JURNAL%20MARIA%20\(10-19-13-05-43-35\).doc](http://ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10/JURNAL%20MARIA%20(10-19-13-05-43-35).doc) pada Jumat, 6 Desember 2013 pukul 20:28 WIB.

M. Hidayat. 2011. *Masalah Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah.* Widya Iswara LPMP Sulawesi Selatan. Diakses melalui: [http://www.lppmpulsel.net/v2/attachments/120\\_masalah%20mutu%20pendidikan\\_M.Hidayat.pdf](http://www.lppmpulsel.net/v2/attachments/120_masalah%20mutu%20pendidikan_M.Hidayat.pdf) pada Rabu, 26 Februari 2014 pukul 11:42 WIB.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktek Analisis Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 *Wajib Belajar.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 *Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 BAB 26 *Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih berkualitas.* Diakses melalui <http://www.bappenas.go.id/files/1413/5463/0207/bab-26-peningkatan-akses-masyarakat-terhadap-pendidikan-yang-lebih-berkualitas.pdf> pada Rabu, 12 Maret 2014 pukul 06:43 WIB.

Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.* Bandung: Alfabeta.

Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_ 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pedoman Teori Praktis Bagi Praktisi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik.*

Wara Winartiningbih. 2009. Evaluasi Implementasi Standar Isi Program Keahlian Teknologi Informasi di SMK Bertaraf Internasional Provinsi D.I Yogyakarta. *Tesis. Program Pascasarjana UNY.*

Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

**SALINAN****PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di seluruh kabupaten/kota, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
    1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
    5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-I atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
    9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
    - 10.setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    - 11.setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    - 12.setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
  - a) Kelas I - II : 18 jam per minggu;
  - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
  - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
  - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diajarnya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

- 13.setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Standar Pelayanan Minimal untuk Petunjuk Umum, Perhitungan Indikator Pencapaian, dan Analisis Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembusukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama dalam hal melaksanakan socialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan
  - b. Laporan semester II merupakan hasil monitoring dan evaluasi semester I dan kinerja penerapan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar satu tahun, disampaikan paling lambat akhir Desember.
- (3) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Pendidikan Dasar.
5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

**MOHAMMAD NUH**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

**AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 464**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

**Muslich, S.H  
NIP 195809151985031001**

### 1. Indikator Pencapaian 1

**Tabel 9. Jumlah Buku Teks**

Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Buku Mata Pelajaran				
		Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Pendidikan Kewarganegaraan
I	63	63	63	63	63	63
II	41	41	41	41	41	41
III	34	34	34	34	34	34
IV	32	32	32	32	32	32
V	34	34	34	34	34	34
Jumlah	204	204	204	204	204	204

Sumber : data yang diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 1} &= \frac{\text{jumlah set buku mata pelajaran}}{\text{jumlah peserta didik}} \times 100 \% \\
 &= \frac{204}{204} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

### 2. Indikator Pencapaian 3

**Tabel 10. Jumlah Peraga IPA**

Jenis Alat Peraga IPA	Jumlah	Ada = 1 Tidak = 0
Model Kerangka Manusia	0	0
Model Tubuh Manusia	0	0
Bola Dunia ( <i>Globe</i> )	11	1
Contoh Peralatan Optik	1	1
Kit IPA	0	0
Poster/Carta IPA	1	1
<b>Jumlah skor</b>		<b>3</b>

Sumber : data yang diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 3} &= \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{6} \times 100\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

### 3. Indikator Pencapaian 4

**Tabel 11. Jumlah Buku Pengayaan dan Buku Referensi**

Jenis Buku	Jumlah
Pengayaan	1270
Referensi	165

Sumber : data yang diolah

Kriteria:

- |  |      |
|--|------|
| a. Terdapat $\geq 100$ buku pengayaan dan $\geq 10$ buku referensi | 100% |
| b. Terdapat 60-99 buku pengayaan dan atau 7-9 buku referensi       | 75%  |
| c. Terdapat 30-59 buku pengayaan dan atau 4-6 buku referensi       | 50%  |
| d. Terdapat $< 29$ buku pengayaan dan atau $< 3$ buku referensi    | 25%  |

Oleh karena itu, tingkat pencapaian indikator ini sebesar 100%

### 4. Indikator Pencapaian 5

**Tabel 12. Daftar Jam Bekerja Guru Tetap Yayasan**

No	Nama	Kelas / Mata Pelajaran	Jam Mengajar (35 menit)	Jam Mengajar (60 menit)	Jam Tambahan	Total Jam Bekerja
1.	Budi Gunawan	Guru Kelas IV b	26	15.10'	27.10'	42.20'
2.	Dwi Sarwanti	Guru Kelas I c	24	14	28.20'	42.20'
3.	Evi Yusnita. E.	Guru Kelas II b	24	14	28.20'	42.20'
4.	Gus Suryanto	Guru Kelas III b	24	14	28.20'	42.20'
5.	H. Sardji. MG	Bahasa Jawa Kelas IV b, V a b	6	3.30'	38.50'	42.20'
6.	Hana Steffiani	Guru Kelas I b	24	14	28.20'	42.20'
7.	Pramana	Penjasorkes Kelas I ab, II b, III b, IV b	16	9.20'	33	42.20'
8.	R. Moh Hani Saputro	PAI III Kelas a b, IV ab	24	14	28.20'	42.20'
9.	Rahmawati Retnaningsih	Guru Kelas V b	24	14	28.20'	42.20'
10.	Rina Dewi. N.	Guru Kelas IV a	26	15.10'	27.10'	42.20'
11.	Rita Wahyu Asmaranti	Guru Kelas II a	24	14	28.20'	42.20'
12.	Rr. Erni Sri. K.	TIK Kelas I-V ab	16	9.20'	33	42.20'
13.	Sugiartini	Guru Kelas III a	24	14	28.20'	42.20'
14.	Supriyanta	PAI, B Arab, Kemuhammadiyah an Kelas V ab	28	16.20'	26	42.20'
15.	Ustanti Dyah. I.	PAI II b, III ab	12	7	35.20'	42.20'
16.	Yuda Kristanti	Guru Kelas I a	24	14	28.20'	42.20'
17.	Yuliana	Guru Kelas V a	24	14	28.20'	42.20'

Sumber : data yang diolah

Keterangan : 1 jam mengajar 35 menit, 1 jam bekerja 60 menit

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 5} &= \frac{\text{jumlah guru yang tetap yang bekerja} \geq 37,5 \text{ jam}}{\text{jumlah seluruh guru tetap}} \times 100\% \\
 &= \frac{17}{17} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

## 5. Indikator Pencapaian 6

**Tabel 13. Jumlah Minggu Proses Pembelajaran**

Semester	Jumlah Minggu Proses Pembelajaran
Semester I	18
Semester II	23
Jumlah	41

Sumber : data yang diolah

**Tabel 14. Jumlah Jam per Minggu Berdasarkan Kelas**

Kelas	Jumlah Jam per Minggu (35 menit)	Jumlah Jam per Minggu (60 menit)
I	46	26.50'
II	47	27.25'
III	47	27.25'
IV	51	29.45
V	51	29.45
VI	-	

Sumber : data yang diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 6} &= \frac{\text{jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar}}{\text{jumlah seluruh rombongan belajar}} \times 100\% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

## 6. Indikator Pencapaian 7

**Tabel 15. Pelaksanaan KTSP**

Dokumen KTSP Sudah Selesai Disusun Ya = 1 Tidak = 0	Dokumen KTSP Dikembangkan Sendiri oleh Sekolah Ya = 1 Tidak = 0	Dokumen KTSP Sudah Diterapkan Ya = 1 Tidak = 0	Monitoring Pelaksanaan KTSP Ya = 1 Tidak = 0	Jumlah skor
√	√	√	√	4

Sumber : data yang diolah

$$\text{Tingkat Pencapaian IP 7} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

## 7. Indikator Pencapaian 8

**Tabel 16. Penerapan RPP oleh Guru**

No	Nama	Selalu Menerapkan RPP Ya = 4	Sering Menerapkan RPP Ya = 3	Kadang2 Menerapkan RPP Ya = 2	Jarang Menerapkan RPP Ya = 1
1.	Drs. H. Sardji, MG			✓	
2.	Yuda Kristanti, S.Pd			✓	
3.	Hana Steffiani, S.Pd			✓	
4.	Dwi Sarwanti, SS			✓	
5.	Rita Wahyu Asmaranti S.Pd			✓	
6.	Evi Yusnita Ekawati, SP			✓	
7.	Sugiarti,S.Pd			✓	
8.	Gus Suryanto, S.Pd			✓	
9.	Rina Dewi Nurwijayanti, S.Pd.Si			✓	
10.	Budi Gunawan, S.Pd.Si			✓	
11.	Yuliana, S.Pd.Si			✓	
12.	Rahmawati Retnaningsih,S.Pd.Si			✓	
13.	R. Moh Hani Saputro, S.Pd.I.			✓	
14.	Supriyanta, S.Pd.I			✓	
15.	Ma'rufah, S.Ag			✓	
16.	Ustanti Dyah Ikhwanti, S.Ag			✓	
17.	Sujiyem, S.Pd.Jas			✓	
18.	Midi			✓	
19.	Pramana, S.Pd			✓	
20.	Sefti Indradewi,S.Pd			✓	
21.	Erni Sri Kusumawati,S.Si			✓	
<b>Jumlah Skor</b>		42			
<b>Skor Maksimal</b>		84			

Sumber : data yang diolah

$$\text{Tingkat Pencapaian IP 8} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{84} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

## 8. Indikator Pencapaian 9

**Tabel 17. Program Penilaian Guru**

No	Nama	Mengembangkan instrumen sesuai KD	Melaksanakan penilaian sesuai rencana	Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kemampuan siswa	Penilaian meliputi Afektif, Kognitif, Psikomotor
1.	Drs. H. Sardji, MG	3	3	3	2
2.	Yuda Kristanti, S.Pd	3	3	3	2
3.	Hana Steffiani, S.Pd	3	3	3	2
4.	Dwi Sarwanti, SS	3	3	3	2
5.	Rita Wahyu Asmaranti S.Pd	3	3	3	2
6.	Evi Yusnita Ekawati, SP	3	3	3	2
7.	Sugiarti,S.Pd	3	3	3	2
8.	Gus Suryanto, S.Pd	3	3	3	2
9.	Rina Dewi Nurwijayanti, S.Pd.Si	3	3	3	2
10.	Budi Gunawan, S.Pd.Si	3	3	3	2
11.	Yuliana, S.Pd.Si	3	3	3	2
12.	Rahmawati Retnaningsih,S.Pd.Si	3	3	3	2
13.	R. Moh Hani Saputro, S.Pd.I.	3	3	3	2
14.	Supriyanta, S.Pd.I	3	3	3	2
15.	Ma'rufah, S.Ag	3	3	3	2
16.	Ustanti Dyah Ikhwanti, S.Ag	3	3	3	2
17.	Sujiyem, S.Pd.Jas	3	3	3	2
18.	Midi	3	3	3	2
19.	Pramana, S.Pd	3	3	3	2
20.	Sefti Indradewi,S.Pd	3	3	3	2
21.	Erni Sri Kusumawati,S.Si	3	3	3	2
<b>Jumlah Skor</b>		63	63	63	42
<b>Skor Maksimal</b>		84	84	84	84

Sumber : data yang diolah

Keterangan:      4 = Selalu      2 = Kadang-kadang  
                   3 = Sering      1 = Jarang

$$\text{Tingkat Pencapaian IP 9} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{231}{336} \times 100\%$$

$$= 69\%$$

## 9. Indikator Pencapaian 10

**Tabel 18. Supervisi Kepala Sekolah**

Supervisi dan Umpam Balik Semester 1		Supervisi dan Umpam Balik Semester 2		Jumlah
Tahap 1 Ya = 1 Tidak = 0	Tahap 2 Ya = 1 Tidak = 0	Tahap 1 Ya = 1 Tidak = 0	Tahap 2 Ya = 1 Tidak = 0	
-	-	-	-	0

Sumber : data yang diolah

$$\text{Tingkat Pencapaian IP 10} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{4} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

## 10. Indikator Pencapaian 11

**Tabel 19. Laporan Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik**

No	Nama	Melaporkan Hasil Belajar			
		Selalu	Sering	Kadang2	Jarang
1.	Drs. H. Sardji, MG	✓			
2.	Yuda Kristanti, S.Pd	✓			
3.	Hana Steffiani, S.Pd	✓			
4.	Dwi Sarwanti, SS	✓			
5.	Rita Wahyu Asmaranti S.Pd	✓			
6.	Evi Yusnita Ekawati, S.Pd	✓			
7.	Sugiarti,S.Pd	✓			
8.	Gus Suryanto, S.Pd	✓			
9.	Rina Dewi Nurwijayanti, S.Pd.Si	✓			
10.	Budi Gunawan, S.Pd.Si	✓			
11.	Yuliana, S.Pd.Si	✓			
12.	Rahmawati Retnaningsih,S.Pd.Si	✓			
13.	R. Moh Hani Saputro, S.Pd.I.	✓			
14.	Supriyanta, S.Pd.I	✓			
15.	Ma'rufah, S.Ag	✓			
16.	Ustanti Dyah Ikhwanti, S.Ag	✓			
17.	Sujiyem, S.Pd.Jas	✓			
18.	Midi	✓			
19.	Pramana, S.Pd	✓			
20.	Sefti Indradewi,S.Pd	✓			
21.	Erni Sri Kusumawati,S.Si	✓			

Sumber : data yang diolah

Keterangan:      Selalu = 4      Kadang = 2  
                           Sering = 3      Jarang = 1

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 11} &= \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100 \% \\
 &= \frac{84}{84} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

### 11. Indikator Pencapaian 12

**Tabel 20. Laporan Hasil Belajar oleh Kepala Sekolah**

No.	Jenis Laporan	Diserahkan		Ya = 1 Tidak = 0
		Oleh	Kepada	
1.	UAS	Kepala Sekolah	Wali murid	1
2.	UKK	Kepala Sekolah	Wali murid	1
3.	US	-	-	0
4.	Rekapitulasi UAS, UKK	Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	1
Jumlah				3

Sumber : data yang diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 12} &= \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{4} \times 100 \% \\
 &= 75\%
 \end{aligned}$$

### 12. Indikator Pencapaian 13

**Tabel 21. Manajemen Berbasis Sekolah**

Adanya Komite Sekolah Ya = 1 Tidak = 0	Adanya Rencana Kerja Tahunan Ya = 1 Tidak = 0	Keterlibatan Komite Sekolah dalam RKT Ya = 1 Tidak = 0	Adanya Laporan Pertanggungjawaban RKT Ya = 1 Tidak = 0
√	-	-	-

Sumber : data yang diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pencapaian IP 13} &= \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1}{4} \times 100 \% \\
 &= 25\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 22. Daftar Guru SD Unggulan Muhammadiyah Kretek**

No	Nama	Kepegawai an	Jabatan	Mengajar di Kelas	Jumlah Jam	Tugas Tertentu
1	Drs. H. Sardji, MG	GTY	Guru Mapel	VI b, V ab	6	Kepala Sekolah B.Jawa
2	Yuda Kristanti, S.Pd	GTY	Guru Kelas	I a	24	
3	Hana Steffiani, S.Pd	GTY	Guru Kelas	I b	24	
4	Dwi Sarwanti, SS	GTY	Guru Kelas	I c	24	
5	Rita Wahyu Asmaranti S.Pd	GTY	Guru Kelas	II a	24	
6	Evi Yusnita Ekawati, S.Pd	GTY	Guru Kelas	II b	24	
7	Sugiarti,S.Pd	GTY	Guru Kelas	III a	24	
8	Gus Suryanto, S.Pd	GTY	Guru Kelas	III b	24	
9	Rina Dewi Nurwijayanti, S.Pd.Si	GTY	Guru Kelas	VI a	26	
10	Budi Gunawan, S.Pd.Si	GTY	Guru Kelas	VI b	26	
11	Yuliana, S.Pd.Si	GTY	Guru Kelas	V a	24	
12	Rahmawati Retnaningsih,S.Pd.Si	GTY	Guru Kelas	V b	24	
13	R. Moh Hani Saputro, S.Pd.I.	GTY	Guru Mapel	III ab, VI ab	24	PAI, Piket
14	Supriyanta, S.Pd.I	GTY	Guru Mapel	V ab	28	PAI, B. Arab, Kemuh
15	Ma'rufah, S.Ag	GTT	Guru Mapel	I ab, II a	12	PAI
16	Ustanti Dyah Ikhwanti, S.Ag	GTY	Guru Mapel	II b, III ab	12	PAI
17	Sujiyem, S.Pd.Jas	PNS	Guru Mapel	I c	3	Penjasorkes
18	Midi	PNS	Guru Mapel	IIa, III a, IV a,V ab	18	Penjasorkes
19	Pramana, S.Pd	GTY	Guru Mapel	I ab, II b, IIIb, IV b	16	Penjasorkes
20	Sefti Indradewi,S.Pd	GTT	Guru Mapel	I-V ab	8	B. Ingris
21	Erni Sri Kusumawati,S.Si	GTY	Guru Mapel	I-V ab	16	T I K, Piket

Sumber: Data primer dan sekunder yang diolah

**KALENDER AKADEMIK**  
**SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK**  
**TAHUN PELAJARAN : 2013/2014**

Juli 2013							Agustus					September					Oktober					Nopember					
Ahad		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
Senin		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
Selasa		9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24		4	11	18	25		5	12	19	26		
Rabu		10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		6	13	20	27		6	13	20	27		
Kamis		11	18	25			8	15	22	29		6	13	20	27		7	14	21	28		7	14	21	28		
Jumat		12	19	26			9	16	23	30		7	14	21	28		8	15	22	29		1	8	15	22		
Sabtu		13	20	27			10	17	24	31		8	15	22	29		9	16	23	30		2	9	16	23		
Desember							Januari 2014					Februari					Maret					April					
Ahad	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
Senin	2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31	7	14	21	28		
Selasa	3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25		1	8	15	22		
Rabu	4	11	18	25			8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26		2	9	16	23		
Kamis	5	12	19	26			9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27		3	10	17	24		
Jumat	6	13	20	27			10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28		4	11	18	25		
Sabtu	7	14	21	28			11	18	25			1	8	15	22		1	8	15	22		5	12	19	26		
Mei							Juni					Juli					Keterangan :										
Ahad	4	11	18	25			1	8	15	22	29		6	13	20	27		Masa Ta'aruf Siswa Baru									
Senin	5	12	19	26			2	9	16	23	30		7	14	21	28		Libur Idul Fitri									
Selasa	6	13	20	27			3	10	17	24			1	8	15	22	29	Pesantren Ramadlan									
Rabu	7	14	21	28			4	11	18	25			2	9	16	23	30	Libur Umum									
Kamis	8	15	22	29			5	12	19	26			3	10	17	24	31	Libur Awal/Akhir Ramadlan									
Jumat	9	16	23	30			6	13	20	27			4	11	18	25		Ulangan Tengah Semester (Prediksi)									
Sabtu	10	17	24	31			7	14	21	28			5	12	19	26		Milad Muhammadiyah									
Ujian Sekolah Kelas 6							Libur Khusus					UN Utama					Penyerahan Rapor										
Hardiknas							Ulangan Akhir Semester					UN Susulan					Libur Semester										



Gedung yang masih dalam tahap pembangunan dibangun



Gedung ruang kelas yang baru selesai



Gedung ruang kelas bangunan lama yang belum dirubah



Ruang Kepala Sekolah, Guru dan TU



Ruang kelas



Gedung Mushola



Gedung Ruang kantor, perpustakaan dan lab komputer



Ruang Perpustakaan



Ruang lab komputer



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/93/6/2014

Membaca Surat :	<b>DEKAN FAKULTAS EKONOMI</b>	Nomor	<b>: 1231/UN.34.18/LT/2014</b>
Tanggal	<b>: 3 JUNI 2014</b>	Perihal	<b>: IJIN PENELITIAN/RISET</b>

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	<b>KHOIRIN NURYANI</b>	NIP/NIM : <b>10404241020</b>
Alamat	<b>FAKULTAS EKONOMI, PENDIDIKAN EKONOMI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>	
Judul	<b>EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK KABUPATEN BANTUL TA 2013/2014</b>	
Lokasi	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY</b>	
Waktu	<b>: 4 JUNI 2014 s/d 4 SEPTEMBER 2014</b>	

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **4 JUNI 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

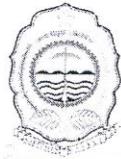


Hendar Susilowati SH

NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. DEKAN FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

112

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2142 / S1 / 2014

**Menunjuk Surat**

Dari : Sekretariat Daerah D.I.Y Nomor : 070/Reg/V/93/6/2014

Tanggal : 04 Juni 2014

Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat**

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama	: KHOIRINA NURYANI
P. T / Alamat	: Fak. Ekonomi UNY Karangmalang Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP	: 10404241020
Tema/Judul	: EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Kegiatan	: PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK
Lokasi	: KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014
Waktu	: SD Unggulan Muhammadiyah Kretek
	: 04 Juni s.d 04 September 2014

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 04 Juni 2014



Tlau Sakti S.S. M.Hum

NIPN 19700105 199903 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3 Ka. Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul
- 4 Ka. UPT Pendidikan Kec. Kretek
- 5 Ka. SD Unggulan Muhammadiyah Kretek
- 6 Wakil Dekan I Fak. Ekonomi UNY
- 7 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)